

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2024/
*31 DECEMBER 2024***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA
TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama/Name | : | Iwan Agung Firstantara |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Centennial Tower, Lantai 7-8, Jl. Gatot Subroto No 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card | : | Suryodiningratan MJ 2/786 RT 39 RW 11, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantriweron Kota Yogyakarta |
| Nomor telepon/Phone number | : | 087867181085 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama / President Director |
| 2. Nama/Name | : | Efin Febriantoro R |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Centennial Tower, Lantai 7-8, Jl. Gatot Subroto No 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ Domicile as stated in ID Card | : | Ketintang Tengah RT 04 RW 01, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya |
| Nomor telepon/Phone number | : | 081553358600 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PLN Energi Primer Indonesia dan entitas anak ("Grup"); | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PLN Energi Primer Indonesia and its subsidiaries (the "Group"); |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information has been disclosed in a complete and truthful manner in the Group's consolidated financial statements; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup. | 4. We are responsible for the Group's internal control systems. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.


Iwan Agung Firstantara
Direktur Utama/President Director


Efin Febriantoro R
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

JAKARTA
Mei/May 30 2025



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Energi Primer Indonesia dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Energi Primer Indonesia and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
30 Mei/May 2025

Firman Sababalat, CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1789



PLN Energi Primer Indonesia
00967/2.1457/AU.1/02/1789-4/1/V/2025

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	1,881,039	1,100,740	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5	10,008,025	6,185,897	Trade receivables
Persediaan	6	1,539,660	623,685	Inventories
Piutang non-usaha, bagian lancar	7	187,702	206,889	Non-trade receivables, current portion
Uang muka dan biaya dibayar di muka, bagian lancar		49,601	45,824	Advances and prepaid expenses, current portion
Piutang sewa pembiayaan, bagian lancar	8	203,550	279,032	Finance lease receivables, current portion
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	18a			Prepaid taxes, current portion
- Pajak penghasilan		99,050	-	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		332,081	74,712	Other taxes -
Aset lancar lainnya		-	27,178	Other current assets
Jumlah aset lancar		14,300,708	8,543,957	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya		29,345	18,858	Restricted cash and cash equivalents
Piutang non-usaha, bagian tidak lancar	7	481,908	443,960	Non-trade receivables, non-current portion
Piutang sewa pembiayaan, bagian tidak lancar	8	2,618,109	2,897,497	Finance lease receivables, non-current portion
Aset tetap	9	2,141,945	1,609,567	Fixed assets
Aset hak-guna	10	2,166,021	1,350,146	Right-of-use assets
Properti pertambangan	11	1,764,118	1,811,410	Mining properties
Investasi pada entitas asosiasi	12	745,174	638,197	Investment in associates
Pajak dibayar di muka, bagian tidak lancar	18a			Prepaid taxes, non-current portion
- Pajak penghasilan		144,982	53,766	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		672,245	392,825	Other taxes -
Aset pajak tangguhan	18d	38,186	35,997	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya		163,015	79,181	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		10,965,048	9,331,404	Total non-current assets
JUMLAH ASET		25,265,756	17,875,361	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	13	5,490,285	2,281,046	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	14	540,390	713,728	Accrued expenses
Liabilitas sewa, bagian jangka pendek	15	778,725	652,076	Lease liabilities, current portion
Utang lain-lain, bagian jangka pendek	16	3,893,451	2,390,146	Other payables, current portion
Pinjaman pemegang saham, bagian jangka pendek	17	255,245	228,525	Shareholder loan, current portion
Utang pajak	18b			Taxes payable
- Pajak penghasilan		118,183	140,744	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		365,384	205,397	Other taxes -
Liabilitas imbalan pascakerja, bagian jangka pendek		<u>1,847</u>	<u>5,583</u>	Post-employment benefits, current portion
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>11,443,510</u>	<u>6,617,245</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa, bagian jangka panjang	15	3,905,397	3,459,926	Lease liabilities, non-current portion
Utang lain-lain, bagian jangka panjang	16	144,325	144,225	Other payables, non-current portion
Pinjaman pemegang saham, bagian jangka panjang	17	1,230,485	1,364,142	Shareholder loan, non-current portion
Liabilitas imbalan pascakerja, bagian jangka panjang		28,947	32,259	Post-employment benefit liabilities, non-current portion
Liabilitas pajak tangguhan	18d	10,929	4,071	Deferred tax liabilities
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang		<u>11,692</u>	<u>11,692</u>	Provision for environmental reclamation and mine closure
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>5,331,775</u>	<u>5,016,315</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>16,775,285</u>	<u>11,633,560</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/3 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah,
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:				Share capital:
Modal dasar - 100.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.298.717 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	19	2,298,717	2,298,717	Authorised - 100,000 shares, issued and fully paid - 2,298,717 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Tambahan modal disetor		(322,522)	(322,522)	Additional paid-in capital
Saldo laba		5,759,668	3,512,291	Retained earnings
Rugi komprehensif lain		(34,544)	(47,129)	Other comprehensive loss
		7,701,319	5,441,357	
Kepentingan non-pengendali	20	789,152	800,444	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		8,490,471	6,241,801	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		25,265,756	17,875,361	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Penjualan	21	41,908,002	20,227,309	Sales
Beban pokok penjualan	22	(37,973,112)	(17,484,806)	Cost of sales
Laba bruto		3,934,890	2,742,503	Gross profit
Beban umum dan administrasi	23	(470,533)	(385,382)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan		27,093	10,140	Finance income
Beban keuangan	24	(749,548)	(501,231)	Finance expenses
Bagian laba dari investasi pada entitas asosiasi	12	36,504	37,067	Share of profit from investment in associates
Beban lain-lain, bersih	25	(93,940)	(204,697)	Other expenses, net
Laba sebelum pajak		2,684,466	1,698,400	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	18c	(447,381)	(246,255)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		2,237,085	1,452,145	Profit for the year
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income/(loss) for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Bagian atas penghasilan/(rugi) komprehensif lainnya dari investasi pada entitas asosiasi	12	1,368	(3,029)	Share of other comprehensive income/(loss) from investment in associates
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali aset non-keuangan anak perusahaan		-	152	Remeasurement of subsidiary's non-financial assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		14,381	(1,459)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	18d	(3,164)	141	Related income tax
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain, setelah pajak		12,585	(4,195)	Other comprehensive income/(loss), net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		2,249,670	1,447,950	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		2,248,377	1,459,930	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(11,292)	(7,785)	Non-controlling interests
		2,237,085	1,452,145	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		2,260,962	1,455,735	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(11,292)	(7,785)	Non-controlling interests
		2,249,670	1,447,950	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah)

	Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Attributable to the owners of the parent entity								
	Modal saham Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Ekuitas entitas restrukturisasi/ Equity of restructured entities	Saldo laba/ Retained earnings	Rugi komprehensif lain/ Other comprehensive loss	Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	25,000	368,877	1,582,318	2,053,361	(42,934)	3,986,622	808,229	4,794,851	Balance as at 1 January 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	1,459,930	-	1,459,930	(7,785)	1,452,145	Profit for the year
Dividen yang diumumkan	-	-	-	(1,000)	-	(1,000)	-	(1,000)	Dividends declared
Dampak dari restrukturisasi entitas sepengendali	2,273,717	(691,399)	(1,582,318)	-	-	-	-	-	Impact from restructuring entities under common control
Rugi komprehensif lain	-	-	-	-	(4,195)	(4,195)	-	(4,195)	Other comprehensive loss
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	2,298,717	(322,522)	-	3,512,291	(47,129)	5,441,357	800,444	6,241,801	Balance as at 31 December 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	2,248,377	-	2,248,377	(11,292)	2,237,085	Profit for the year
Dividen yang diumumkan	-	-	-	(1,000)	-	(1,000)	-	(1,000)	Dividends declared
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	12,585	12,585	-	12,585	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	2,298,717	(322,522)	-	5,759,668	(34,544)	7,701,319	789,152	8,490,471	Balance as at 31 December 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of the consolidated financial statements.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	38,053,226	16,191,849	<i>Receipts from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(36,164,723)	(16,959,726)	<i>Payments to suppliers and employees</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(590,839)	(120,660)	<i>Payments of corporate income tax</i>
Penerimaan pengembalian pajak	119,560	179,642	<i>Receipts of tax refunds</i>
Pembayaran beban royalti	(75,815)	(64,739)	<i>Payments of royalty expenses</i>
Pembayaran beban keuangan	(463,032)	(215,320)	<i>Payments of finance expenses</i>
Penerimaan pendapatan keuangan	27,093	10,410	<i>Receipts of finance income</i>
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>905,470</u>	<u>(978,544)</u>	<i>Net cash provided by/ (used in) operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	7,918	7,935	<i>Receipts of dividends from associates</i>
Penambahan properti pertambangan	(343)	(542)	<i>Additions of mining properties</i>
Akuisisi entitas asosiasi	(93,497)	-	<i>Acquisitions of associate entity</i>
Pembelian aset tetap	(775,745)	(564,781)	<i>Acquisitions of fixed assets</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(861,667)</u>	<u>(557,388)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan <i>Notional Pooling</i>	5,238,565	2,212,206	<i>Proceeds from Notional Pooling</i>
Pembayaran <i>Notional Pooling</i>	(3,650,859)	(429,534)	<i>Payments of Notional Pooling</i>
Pembayaran dividen kepada entitas induk	(1,000)	(1,000)	<i>Payments of dividend to the parent entity</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(695,771)	(344,646)	<i>Payments of lease liabilities</i>
Penerimaan pinjaman pemegang saham	101,477	297,606	<i>Proceeds from shareholder loan</i>
Pembayaran pinjaman pemegang saham	(255,916)	(404,825)	<i>Payments of shareholder loan</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>736,496</u>	<u>1,329,807</u>	<i>Net cash provided by financing activities</i>
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH ATAS KAS DAN SETARA KAS	780,299	(206,125)	<i>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>1,100,740</u>	<u>1,306,865</u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</i>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>1,881,039</u>	<u>1,100,740</u>	<i>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Energi Primer Indonesia ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Agustus 2008 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-58468.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 November 2008, Tambahan No. 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 108 tanggal 25 Januari 2024, dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, untuk mengubah maksud, tujuan dan kegiatan Perusahaan menjadi melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan bahan bakar tersebut dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk memberikan penugasan kepada anak Perusahaan. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0008905.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 7 Februari 2024.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Centennial Tower Lantai 7-8 Jl. Gatot Subroto No.24-25 Setiabudi, Jakarta 12930.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perusahaan sebanyak 301 karyawan (2023: 254 karyawan) (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Energi Primer Indonesia (the "Company") was established in Jakarta based on Deed No. 3 dated 11 August 2008 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-58468.AH.01.01.Tahun 2008 dated 3 September 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 11 November 2008, Supplement No. 91.

The Articles of Association of the Company have been amended several times. The articles of Association of the Company were recently amended by Notarial Deed No. 108 dated 25 January 2024, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, to change the Company's purpose, objective, and activities to engage in large-scale trading of solid, liquid, and gas fuels and products related to those fuels, and/or supporting business activities to optimize the utilization of the Company's resources, including assigning tasks to the Company's subsidiaries. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0008905.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 7 February 2024.

The Company's parent entity is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), a company which is incorporated and domiciled in Indonesia.

The Company's head office is located at Centennial Tower Level 7-8 Jl. Gatot Subroto No.24-25 Setiabudi, Jakarta 12930.

As at 31 December 2024, the Company had a total number of 301 employees (2023: 254 employees) (unaudited).

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Pembentukan struktur subholding

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No.S-886/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN Masa/Tahap *Legal End-State* serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, PLN membentuk empat *subholding* yang terdiri dari:

1. Dua *subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PT PLN Nusantara Power ("PNP") (dahulu PT Pembangkitan Jawa Bali) dan PT PLN Indonesia Power ("PIP") (sebelumnya PT Indonesia Power);
2. Satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu Perusahaan (sebelumnya PT PLN Batubara); dan
3. Satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*), yaitu bernama PT PLN ICON Plus ("ICON+").

Sebagai tindak lanjut pembentukan *subholding* PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 78 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta Selatan tentang penyetoran modal non-tunai (inbreng) PLN ke Perusahaan, yang menyatakan bahwa PLN akan secara hukum mengalihkan pengendalian, termasuk aset, kewajiban, keuntungan dan kerugian yang didapat dari penyertaan saham atas PT PLN Energi Gas ("PLN EG") dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG") kepada Perusahaan sejak tanggal efektif pengalihan di 1 Januari 2023.

c. Susunan pengurus dan informasi lain

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
dan Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

Achmad Bakir Pasaman
Sahala Benny Pasaribu
Daneth Fitrianto
Martina
Singgih Widagdo
Adi Lumakso*)

*) Masa jabatan telah resmi berakhir sesuai dengan keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau Keputusan Sirkular yang efektif sejak 23 April 2025.

1. GENERAL (continued)

b. Establishment of subholding structures

Based on the Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-886/MBU/12/2022 dated 30 December 2022 regarding the Approval for the Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 69, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. Two subholdings in the power generation sector, namely PT PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and PT PLN Indonesia Power ("PIP") (formerly PT Indonesia Power);
2. One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, which is the Company (formerly PT PLN Batubara); and
3. One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (*Beyond kWh*), namely PT PLN ICON Plus ("ICON+").

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notarial Deed No. 78 dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., notary in South Jakarta regarding PLN's non-cash paid in capital to the Company, it was stated that PLN will legally transfer control, including assets, liabilities, profits and losses derived from the investment in shares of PT PLN Energi Gas ("PLN EG") and PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG") to the Company from the effective date of the transfer on 1 January 2023.

c. Management and other information

As at 31 December 2024, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors is as follows:

Board of Commissioners

President and
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

*) The tenure has officially ended in accordance with the shareholder's decision outside of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), or through a Circular Resolution, effective as of 23 April 2025.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Susunan pengurus dan informasi lain (lanjutan)

c. Management and other information (continued)

Direksi

Direktur Utama
Direktur Batubara
Direktur Gas dan BBM
Direktur Biomassa
Direktur Keuangan
Direktur Manajemen Sumber
Daya Manusia dan Administrasi

Iwan Agung Firstantara
Ary Bastari
Rakhmad Dewanto
Antonius Aris Sudjatmiko
Efin Febriantoro R.
Dedeng Hidayat

Board of Directors

President Director
Coal Director
Gas and Fuel Director
Biomass Director
Finance Director
Human Resources Management
and Administration Director

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2023, the composition of the
Company's Boards of Commissioners and
Directors is as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
dan Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris

Achmad Bakir Pasaman
Sahala Benny Pasaribu
Daneth Fitrianto
Yusuf Didi Setiarto
Singgih Widagdo

Board of Commissioners

President and
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Batubara
Direktur Gas dan BBM
Direktur Biomassa
Direktur Keuangan
Direktur Manajemen Sumber
Daya Manusia dan Administrasi

Iwan Agung Firstantara
Ary Bastari
Rakhmad Dewanto
Antonius Aris Sudjatmiko
Efin Febriantoro R.
Dedeng Hidayat

Board of Directors

President Director
Coal Director
Gas and Fuel Director
Biomass Director
Finance Director
Human Resources Management
and Administration Director

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan
Komite Audit Perusahaan adalah sebagai
berikut:

As at 31 December 2024, the composition of the
the Company's Audit Committee is as follows:

Ketua
Wakil
Anggota
Anggota
Anggota

Daneth Fitrianto
Martina
Joko Tri Susilo
R Krisna Simbaputra*)
Edward Sinarta**)

Chairman
Vice Chairman
Members
Members
Members

*) Masa jabatan telah resmi berakhir sesuai dengan Keputusan Dewan
Komisaris Perusahaan No. 0005.SK/DK-PLNEPI/2025 tanggal 15 Januari
2025.

*) The tenure has officially ended in accordance with the Company's Board of
Commissioners' Decree No. 0005.SK/DK-PLNEPI/2025 dated 15 January
2025.

**) Secara resmi diangkat sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris
Perusahaan No. 0005.SK/DK-PLNEPI/2025 pada tanggal 15 Januari 2025.

**) Officially appointed in accordance with the Company's Board of Commissioners'
Decree No. 0005.SK/DK-PLNEPI/2025 dated 15 January 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan
Komite Audit Perusahaan adalah sebagai
berikut:

As at 31 December 2023, the composition of the
the Company's Audit Committee is as follows:

Ketua
Anggota
Anggota

Daneth Fitrianto
Joko Tri Susilo
R Krisna Simbaputra

Chairman
Members
Members

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas anak sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries

The Company has either direct or indirect ownership in the following subsidiaries:

Entitas/ <i>Entity</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of Business</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>		Tahun operasi komersial/ <i>Commercial operation year</i>	Jumlah aset sebelum eliminasi)/ <i>Total assets before elimination)</i>	
			31	31		31	31
			Desember/ <i>December</i>	Desember/ <i>December</i>		Desember/ <i>December</i>	Desember/ <i>December</i>
			2024	2023		2024	2023
Kepemilikan langsung/ <i>Direct ownership</i>							
BAG	Jakarta	Transportasi/ <i>Transportation</i>	99.99	99.99	1961	6,058,839	6,105,987
PT PLN Batubara Niaga ("BBN")	Jakarta	Perdagangan batubara/ <i>Coal trading</i>	99.99	99.99	2020	3,241,469	2,558,818
PT PLN Batubara Investasi ("BBI")	Jakarta	Investasi/ <i>Investment</i>	99.99	99.99	2018	2,825,891	2,791,818
PLN EG	Jakarta	Ketenagalistrikan/ <i>Electricity</i>	99.99	99.99	2009	2,442,858	2,563,911
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Jambi	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	60.00	60.00	2010	236,211	265,644
Kepemilikan tidak langsung melalui BBI/ <i>Indirect ownership through BBI</i>							
PT Bangun Persada Jambi Energi ("BPJE")	Jambi	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	80.00	80.00	*)	36,949	36,962
PT Mahakarya Abadi Prima ("MAP")	Jambi	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	80.00	80.00	*)	3,013	3,073
PT Banyan Koalindo Lestari ("BKL")	Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	51.00	51.00	2018	878,159	769,594
PT Prima Bara Indonesia ("PBI")	Kalimantan Tengah/ <i>Central Kalimantan</i>	Pertambangan batubara/ <i>Coal mining</i>	51.00	51.00	*)	187,656	187,313

*) Belum beroperasi secara komersial

*) Not yet in commercial operation

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and the subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

e. Izin Usaha Pertambangan ("IUP")

e. Mining licences ("IUP")

Entitas/ Entity	Lokasi/ Location	Tanggal perolehan izin produksi/ Production licence acquisition date	Berlaku sampai/ Valid until	Total cadangan terbukti (MT)/ Proven reserves (MT) (tidak diaudit/ unaudited)	Total cadangan terkira (MT)/ Probable reserves (MT) (tidak diaudit/ unaudited)
JPC	Jambi	28 Desember/ December 2009	28 Desember/ December 2027	63,000,000	27,000,000
BPJE	Jambi	28 Desember/ December 2011	28 Desember/ December 2031	4,000,000	3,000,000
MAP	Jambi	15 Maret/ March 2015	15 Maret/ March 2035	11,000,000	7,000,000
BKL	Sumatera Selatan/ South Sumatera	19 April/ April 2010	18 April/ April 2030	18,100,000	2,700,000
PBI	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	17 Februari/ February 2015	17 Februari/ February 2035	22,000,000	17,000,000

Informasi terkait jumlah cadangan yang tercantum dalam laporan ini didasarkan pada:

Information in this report relates to amount of reserves based on:

- a. JPC, BPJE, dan MAP berdasarkan Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017 oleh RPM Global tanggal 19 Oktober 2017;

- a. JPC, BPJE and MAP based on Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017 by RPM Global dated 19 October 2017;

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Izin Usaha Pertambangan ("IUP") (lanjutan)

- b. BKL berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017* oleh PT New Resource Mine Consulting ("NRM") tanggal 31 Juli 2018;
- c. PBI berdasarkan *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2018* oleh RPM Global tanggal 29 Januari 2019.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2c untuk informasi mata uang fungsional grup.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Untuk memberi pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

1. GENERAL (continued)

e. Mining licences ("IUP") (continued)

- b. BKL based on *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2017* by PT New Resource Mine Consulting ("NRM") dated 31 July 2018;
- c. PBI based on *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as at 31 July 2018* by RPM Global dated 29 January 2019.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated. Refer to Note 2c for the information on the group's functional currency

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2023, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significant nature or amount, several items of income or expenses have been shown separately.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia.

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen PSAK 201, 'Penyajian Laporan Keuangan', mengklarifikasi bagaimana kondisi yang harus dipatuhi suatu entitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan mempengaruhi klasifikasi suatu kewajiban.

- Amendemen PSAK 116 "Sewa" – Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik

Amandemen PSAK 116, 'Sewa' mencakup persyaratan transaksi jual dan sewa kembali dalam PSAK 116 yang menjelaskan bagaimana entitas mencatat penjualan dan penyewaan kembali setelah tanggal transaksi. Transaksi jual dan sewa kembali yang sebagian atau seluruh pembayaran sewanya merupakan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga, kemungkinan besar akan terkena dampaknya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION INFORMATION (continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Beginning 1 January 2024, reference to the individual SFAS and IFAS has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board Of Indonesia Institute of Accountants.

The adoption of these amended standards that are effective beginning 1 January 2024 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

- *Amendment of SFAS No. 201 "Presentation of financial statement" – Non-current Liabilities with Covenants*

The amendment to SFAS 201, 'Presentation of Financial Statements', clarifies how conditions with which an entity must comply within twelve months after the reporting period affect the classification of a liability

- *Amendment of SFAS 116 'Leases' – Lease liability in a Sale and Leaseback*

Amendments to SFAS 116, 'Lease' include the terms of sale and leaseback transactions in SFAS 116 to explain how an entity records sales and leasebacks after the date of the transaction. Sale and leaseback transactions where some or all of the rental payments are variable rental payments that are not dependent on indexes or rates are likely to be impacted.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan
(lanjutan)**

- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" – Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan bagi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan terkait fasilitas pembiayaan dari pemasok. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menilai dampak fasilitas pembiayaan tersebut terhadap liabilitas, arus kas, dan likuiditas, serta dampaknya jika fasilitas pembiayaan tidak lagi tersedia.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Amendemen PSAK 221 ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup masih menilai dampak dari standar dan amendemen akuntansi baru.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations of
statement of financial accounting standards
(continued)**

- Amendment of SFAS 207 "Statement of Cash Flows" and amendment of SFAS 107 "Financial Instrument: Disclosure" – Supplier Finance Agreements

This amendment aims to improve the quality of disclosure for decision making by financial report users regarding financing facilities from suppliers. This allows users to assess the impact of the financing facility on liabilities, cash flow and liquidity, as well as the impact if the financing facility is no longer available.

Certain new accounting standards and interpretations have been issued but not only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025, but early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS 117 "Insurance Contracts"

SFAS 117 regulates the relaxation of several provisions, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions. SFAS 117 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and from investment activities.

- Amendment of SFAS 221 "Lack of Exchangeability"

Amendment of SFAS 221 clarifies the conditions regarding conditions when a currency is not exchanged and its disclosure.

As at 31 December 2024, the Group is still assessing the impact of the new and amended accounting standards.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

- Konsolidasi

Entitas anak adalah semua entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antar grup perusahaan dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi anak perusahaan telah diubah dimana diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diadopsi oleh Grup.

- Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

- Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the group.

- Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

- Akuisisi (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

- Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non-pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

- Acquisition (continued)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

- Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any *goodwill*) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

ii. Changes in ownership interest

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognised in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan (lanjutan)

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

iii. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas (lihat poin (e) dibawah), setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

ii. Changes in ownership interest (continued)

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate.

In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss

If the ownership interest in an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate

iii. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting (see (e) below), after initially being recognised at cost.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iii. Entitas asosiasi (lanjutan)

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- Metode ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari *investee* atas pendapatan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

iii. Associates (continued)

- Acquisition

Investment in an associate is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate represents the excess of the cost of acquisition of the associate over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate and is included in the carrying amount of the investment.

- Equity method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of its associate's post-acquisition profits or losses is recognised in profits or losses and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Konsolidasi (lanjutan)

iii. Entitas asosiasi (lanjutan)

- Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Consolidation (continued)

iii. Associates (continued)

- Equity method (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Disposal

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Konsolidasi (lanjutan)

iii. Entitas asosiasi (lanjutan)

- Pelepasan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

c. Penjabaran mata uang asing

- Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

- Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Consolidation (continued)

iii. Associates (continued)

- Disposal (continued)

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

c. Foreign currency translation

- Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

- Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions.

As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency were adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

- Transaksi dan saldo (lanjutan)

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")	16,157	15,439

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

c. Foreign currency translation (continued)

- Transactions and balances (continued)

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of the consolidated statement of financial position published by Bank Indonesia were as follows:

United States of Dollar ("US Dollar")
--

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 224, "Related Parties Disclosures", as follows:

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (i) Has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
 - (i) The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
 - (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- (viii) Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

d. Transactions with related parties (continued)

- (v) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
- (vi) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
- (vii) *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or*
- (viii) *The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Kas dan setara kas (lanjutan)

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

f. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah yang dapat diterima dari pelanggan atas penjualan gas, penjualan batubara serta jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha normal. Piutang non-usaha merupakan saldo piutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Grup. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap *item* baris yang sama.

g. Aset keuangan

l. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut ini:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

e. Cash and cash equivalents (continued)

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which can not be used freely are classified as restricted cash and cash equivalents.

f. Trade and non-trade receivables

Trade receivables represent amounts due from customers for gas sold, coal sold, and services performed in the normal course of business. Other receivables represent receivables that are not related to the normal business activities of the Group. If receivables are expected to be collected within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the consolidated statement of financial position.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

g. Financial assets

l. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:

- *financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Aset keuangan (lanjutan)

**I. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran
(lanjutan)**

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial assets (continued)

**I. Classification, recognition and
measurement (continued)**

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Aset keuangan (lanjutan)

**I. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran
(lanjutan)**

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial assets (continued)

**I. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Debt instruments (continued)

- *Fair value through other comprehensive income: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses on foreign exchanges, net and impairment expenses in other expenses.*
- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Aset keuangan (lanjutan)

II. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

III. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial assets (continued)

II. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

III. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menerapkan “pendekatan yang disederhanakan” untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

i. Persediaan

Gas

Persediaan gas merupakan volume gas yang masih tersedia dalam *Floating Storage Regasification Unit* (“FSRU”) dan pipa gas yang belum disalurkan ke pembangkit listrik pada periode berjalan. Persediaan gas disajikan berdasarkan harga perolehan persediaan gas.

Batubara

Persediaan batubara merupakan batubara yang menjadi hak Grup dan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak yang mencakup alokasi komponen tenaga kerja, penyusutan dan biaya *overhead* yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan beban penjualan.

Penyisihan persediaan batubara usang ditentukan berdasarkan estimasi penjualan persediaan pada masa mendatang.

Persediaan suku cadang dan bahan bakar

Persediaan suku cadang dan bahan bakar dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang. Persediaan bahan pemeliharaan dibebankan ke beban perbaikan dan pemeliharaan pada periode penggunaan bahan tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(continued)**

h. Impairment of financial assets (continued)

The Group applies the “simplified approach” to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected credit loss allowance for all trade receivables and other receivables without significant financing components. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

i. Inventories

Gas

Gas inventory represents volume of gas held in *Floating Storage Regasification Unit* (“FSRU”) and gas pipelines that have not been distributed to electricity generators during the usage period. Gas inventories are presented based on the acquisition price of gas.

Coal

Coal inventory represents the Group’s entitlement to coal on hand and is valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined on a moving average basis, which includes an appropriate allocation of labour, depreciation and overheads related to mining activities. Net realisable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and selling expenses.

An allowance for obsolete coal inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of inventory items.

Spare parts and fuel

Spare parts and fuel are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage. Supplies of maintenance materials are charged to repair and maintenance expense in the period in which they are used.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

j. Aset tetap

Pada awalnya, aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi atas penurunan nilai. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak yang bersangkutan.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 116 "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216 "Aset Tetap".

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai estimasi nilai sisa selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, umur tambang atau masa IUP sebagai berikut:

	<u>Years</u>	
Bangunan dan infrastruktur	10 - 50	<i>Buildings and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin	30 - 40	<i>Installations and machines</i>
Perlengkapan pengolahan data	10	<i>Processing equipment</i>
Perlengkapan telekomunikasi	10	<i>Telecommunication equipment</i>
Perlengkapan umum	5	<i>General equipment</i>
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	5 - 25	<i>Motor and moving vehicles</i>

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

j. Fixed assets

Fixed assets are initially recognised at cost and subsequently, carried at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment under SFAS 116 "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 216 "Fixed Assets".

Land is not depreciated. Fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method to their residual values over the shorter of estimated useful lives of the assets, the life of the mine, or IUP terms as follows:

The useful lives, residual values and depreciation methods of fixed assets are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss when the changes arise.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada "beban lain-lain, bersih" dalam laporan laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Pekerjaan dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan. Pekerjaan dalam pelaksanaan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

k. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah yang dicatat sebagai aset tetap.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

j. Fixed assets (continued)

Net gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "other expenses, net" in the profit or loss.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an assets are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognised.

Construction in progress

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of fixed costs. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to a fixed asset account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

k. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights which are recorded as fixed assets.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

k. Properti pertambangan (lanjutan)

Properti pertambangan yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya.

Saldo properti pertambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai dari awal periode terjadinya perubahan.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "pertambangan yang sedang dikembangkan" pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan yang terjadi setelahnya.

"Pertambangan yang sedang dikembangkan" direklasifikasi ke "pertambangan yang berproduksi" pada akun properti pertambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai dengan rencana manajemen. "Pertambangan yang sedang dikembangkan" tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi "pertambangan yang berproduksi".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "pertambangan yang berproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Pertambangan yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. "Pertambangan yang berproduksi" didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Properti pertambangan diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 21.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

k. Mining properties (continued)

Mining properties acquired through business combinations are initially recognised as assets at their fair value.

The balance of mining properties is amortised over the life of the property using the units-of-production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

Once a development decision has been taken, the carrying amount of the exploration and evaluation assets in respect of the area of interest is transferred to "mines under development" within mining properties and aggregated with the subsequent development expenditure.

"Mines under development" are reclassified as "mines in production" within mining properties at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating in the manner intended by management. No amortisation is recognised for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production".

When further development expenditure is incurred on a mining property after the commencement of production, the expenditure is carried forward as part of "mines in production" when it is probable that additional future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group. Otherwise, such expenditure is classified as a cost of production.

"Mines in production" (including reclassified exploration, evaluation and development expenditure, and payments to acquire mineral rights and leases) are amortised using the units-of-production method, with separate calculations being made for each area of interest. "Mines in production" will be depleted using a units-of-production method on the basis of proven and probable reserves.

Mining properties are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 21.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

I. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

I. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units).

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

n. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan, sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya-biaya ini dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

m. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired out of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently stated at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowing using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

p. Kewajiban lingkungan

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok penjualan pada saat kewajiban dari pemulihan atas area yang terganggu tersebut selama penambangan.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan sebagai beban pokok penjualan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

o. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

p. Environmental obligations

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred in relation to the remediation of areas disturbed during the production phase are charged to cost of sales as the obligation arises from the disturbance as extraction progresses.

These obligations are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation has arisen from activities which have already been performed. This obligation is initially and subsequently measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arises during production are also charged to the cost of sales, while the increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance expenses.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Kewajiban lingkungan (lanjutan)

Provisi dibentuk untuk kegiatan-kegiatan pasca tambang yang terkait dengan aset-aset yang ditinggalkan dan dibongkar sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, sistem *crushing* dan *handling*, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset. Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari aset terkait dan kemudian disusutkan atau didepleksi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban pasca operasi yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan.

Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

p. Environmental obligations (continued)

A provision for the decommissioning of mining assets and related post-mining activities as well as the abandonment and decommissioning of other long-lived assets is provided for the legal obligations associated with the retirement of mining related assets and other long-lived assets including the decommissioning of such assets that resulted from the acquisition, construction or development of such assets. These obligations are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation is incurred with respect to the retirement of an asset, with the initial and subsequent measurement of the obligation at the present value of the expenditure which is expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation.

An asset retirement cost equivalent to these liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to the passage of time is recognised as finance expenses.

The changes in the measurement of decommissioning obligations that result from changes in the estimated timing or amount of any outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flow) required to settle the obligations, or a change in the discount rate will be added to or deducted from, the cost of the related asset in the current year.

The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will record the impairment loss incurred, if any.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Sewa

Grup sebagai pemberi sewa

Ketika Grup bertindak sebagai pemberi sewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

Pendapatan sewa dari operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised as revenue on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 20 years but may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, sebagai contoh jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Leases (continued)

The Group as a lessee

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivables;
- variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
- uses a build-up approach that starts with a risk free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, where there is no recent third-party financing; and
- makes adjustments specific to the lease, eg term, country, currency and security.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima; dan
- biaya langsung awal, dan biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received; and*
- *any initial direct costs, and restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use assets are depreciated over the underlying assets' useful life.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revision menggunakan tingkat diskonto revision. Tingkat diskonto revision ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease; and
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Subsewa

Grup sebagai penyewa aset tetap tertentu juga menyewakan kembali aset tetap tersebut ke penyewa. Dalam transaksi ini, Grup bertindak sebagai *intermediate lessor*. Ketika *intermediate lessor* melakukan transaksi subsewa, *intermediate lessor*:

- menghentikan pengakuan aset hak-guna untuk aset tetap tertentu yang disewakan kembali ke penyewa dan mengakui piutang sewa pembiayaan;
- mengakui selisih antara aset hak-guna dan piutang sewa pembiayaan tersebut di laba rugi;
- tetap mengakui liabilitas sewa yang berhubungan dengan aset tetap tertentu tersebut; dan
- mengakui penghasilan keuangan dari subsewa dan beban keuangan dari sewa utamanya selama periode subsewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the measurement of the lease liability by:

- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Sublease

The Group as the lessee of certain fixed assets also leases back the fixed assets to the lessee. In this transaction, the Group acts as an intermediate lessor. When an intermediate lessor enters into a sublease transaction, the intermediate lessor:

- *not recognising right-of-use assets for certain fixed assets that are leased back to lessees and recognise finance lease receivables;*
- *recognise the difference between the right-of-use assets and the finance lease receivables in profit or loss;*
- *continue to recognise the lease liability associated with certain fixed assets; and*
- *recognises finance income from the sublease and finance expenses from the main lease over the period of the sublease.*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

s. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

t. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- i. identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- ii. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- iv. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
- v. pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

r. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

s. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

t. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition must fulfill five steps of assessment:

- i. identify contract(s) with a customer;*
- ii. identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- iii. determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
- iv. allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and*
- v. recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).*

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- suatu titik waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Penjualan gas

Penjualan gas berasal dari kegiatan niaga gas. Pendapatan dari niaga gas diakui pada saat gas telah didistribusikan kepada pelanggan berdasarkan pencatatan pada angka meteran gas pada titik serah terima gas yang disepakati.

Penjualan batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian berpindah ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Oleh karena itu, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

t. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Sales of gas

Sales of gas are earned from gas trading. Revenues from gas trading are recognised when gas is distributed to the customer based on the gas meter readings at agreed handover point.

Sales of coal

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customer and sales revenue is recognised when the product is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customer's premises.

The Group generally sells its coal products under *Free on Board* ("FOB") terms, where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. For this term there is only one performance obligation, being for provision of product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal under *Cost, Insurance and Freight* ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port. As such, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation with the sale of coal due to the control over coal supplies passing to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Sewa kapal

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Jasa manajemen

Pendapatan dari jasa manajemen yang berasal dari kegiatan usaha biasa diakui ketika jasa telah selesai dilaksanakan kepada pelanggan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

u. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di rugi komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam rugi komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan dalam provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

t. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

Vessel charter

Sales revenue from vessel charter is recognised in the accounting period when the services are provided.

Management fee

Service revenue from management fee performed in the ordinary course of business are recognised when the services to customers are completed.

Expenses recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

u. Current and deferred income tax

The tax expense comprised current and deferred taxes. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive loss or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive loss or directly in equity, respectively.

The current income tax is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in the annual tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**u. Pajak penghasilan kini dan tangguhan
(lanjutan)**

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

u. Current and deferred income tax (continued)

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; or deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2, the management is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered relevant. Actual results may differ from these estimates.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap tahun tersebut, atau pada tahun revisi dan tahun berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi tahun tersebut.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau tahun setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

Sewa - estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the year in which the estimate is revised if the revision affects only that year, or in the year of the revision and future years if the revision affects both current and future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or years after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

Leases - estimation of the incremental borrowing rate

Since the Group cannot readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**Sewa - estimasi suku bunga pinjaman inkremental
(lanjutan)**

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

**Leases - estimation of the incremental borrowing
rate (continued)**

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Income taxes

The calculations of income tax expenses for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimation and assumption regarding the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang
usaha dan aset keuangan lainnya**

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi, dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

**Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan
tambang**

Kebijakan akuntansi Grup dalam pengakuan nilai provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan, seperti persyaratan hukum dan regulasi yang relevan, serta waktu, cakupan dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan perbedaan atas biaya aktual di masa mendatang dengan jumlah yang dicadangkan saat ini.

Pencadangan yang diakui untuk setiap lokasi ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan pada fakta dan keadaan pada saat itu. Saldo penyisihan ini dicatat sebagai bagian dari "provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang".

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

**Provision for expected credit losses of trade
receivables and other financial assets**

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating and other matters).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions, and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

**Provision for environmental reclamation and mine
closure**

The Group accounting policy for the recognition of provision for environmental reclamation and mine closure requires significant estimates and assumptions, such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, and the timing, extent and costs of required environmental and reclamation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided.

The provision recognised for each location is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at that time. The balance of the provision is recorded as part of "provision for environmental reclamation and mine closure".

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi Cadangan

Cadangan merupakan estimasi jumlah batubara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari area konsesi tambang Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code") of the Australasian Joint Ore Reserves Committee ("JORC")* dan hasil dari aktivitas survei internal Grup. Dalam memperkirakan cadangan batubara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Dalam memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman batubara atau lahan yang ditentukan dengan menganalisis data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Estimated useful lives of fixed assets

The useful life of each item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of fixed assets.

Reserve estimates

Reserves are estimates of the amounts of coal that can be economically and legally extracted from the Group's mining concession areas. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code") of the Australasian Joint Ore Reserves Committee ("JORC") and the Group's internal survey activities. In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Estimasi Cadangan (lanjutan)

Dampak cadangan terhadap pelaporan keuangan

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan data geologi tambahan yang dihasilkan selama aktivitas penambangan itu, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang diestimasi dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- Penyusutan, deplesi dan amortisasi yang dibebankan dalam laba rugi dapat berubah jika beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika umur ekonomis aset berubah;
- Beban pemindahan lapisan tanah yang dibebankan pada laba rugi dapat berubah karena adanya perubahan rasio pengupasan tanah;
- Provisi untuk pembongkaran, restorasi lokasi aset, dan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam estimasi cadangan yang mempengaruhi harapan mengenai waktu atau biaya dari kegiatan-kegiatan ini; dan
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Reserve estimates (continued)

Reserve impact on financial reporting

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and that additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in estimated reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- *Asset carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flow;*
- *Depreciation, depletion and amortisation charged to profit or loss may change where such charges are determined based on the units of production basis, or where the useful economic lives of assets change;*
- *Overburden removal costs charged to profit or loss may change due to changes in stripping ratios;*
- *Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations regarding the timing or cost of these activities; and*
- *The carrying values of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there is any indication of impairment. If any indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of the fair value less costs to disposal or value in use.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'estimasi cadangan'), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laba rugi.

Sebagai alternatif, di tengah keterbatasan informasi mengenai nilai dari aset yang dimiliki pada pasar langsung yang dapat diobservasi, nilai yang dapat dipulihkan dapat diestimasi berdasarkan transaksi serupa terkini atau transaksi potensial yang melibatkan aset atau unit penghasil kas yang serupa.

Nilai realisasi bersih dari persediaan

Grup menelaah nilai tercatat dari persediaan pada setiap tanggal pelaporan untuk memastikan bahwa biaya tidak melebihi nilai realisasi bersih. Estimasi dari nilai realisasi menggunakan beberapa asumsi, termasuk perkiraan harga komoditas dan estimasi biaya untuk menyelesaikan persediaan ke produk yang dapat dijual.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'reserve estimates'), operating costs, closure and rehabilitation costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amounts of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charges reduced with the impact recorded in profit or loss.

Alternatively, in the absence of directly observable market prices for our assets, the recoverable amount may be estimated based on recent comparable transactions or other potential transactions involving a comparable asset or cash generating unit.

Net realisable value of inventory

The Group reviews the carrying value of its inventory at each reporting date to ensure that the cost does not exceed the net realisable value. Estimates of net realisable value include a number of assumptions, including commodity price expectations and the estimated costs to complete inventory into a saleable product.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas	20,608	638
Kas di bank - Rupiah		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.		
("Bank Mandiri")	648,935	769,639
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk.		
("Bank BNI")	514,010	163,650
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk.		
("Bank BRI")	403,898	125,316
PT Bank Syariah		
Indonesia Tbk.		
("Bank BSI")	275,935	10,732
	<u>1,842,778</u>	<u>1,069,337</u>

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in banks - Rupiah
Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Bank Mandiri")
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.
("Bank BNI")
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
("Bank BRI")
PT Bank Syariah
Indonesia Tbk.
("Bank BSI")

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	887	663	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</i>
PT Bank KB Bukopin Tbk.	96	81	<i>PT Bank KB Bukopin Tbk.</i>
PT Bank Central Asia Tbk.	<u>20</u>	<u>21</u>	<i>PT Bank Central Asia Tbk.</i>
	<u>1,003</u>	<u>765</u>	
Deposito berjangka - pihak berelasi			<i>Time deposits - related parties</i>
Bank BRI	15,000	30,000	<i>Bank BRI</i>
Bank BNI	<u>1,650</u>	<u>-</u>	<i>Bank BNI</i>
	<u>16,650</u>	<u>30,000</u>	
	<u>1,881,039</u>	<u>1,100,740</u>	

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of related party transactions.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PNP	3,361,812	2,216,558	<i>PNP</i>
PIP	3,318,061	1,861,228	<i>PIP</i>
PLN	1,784,945	605,414	<i>PLN</i>
PT Shenhua Guohua PJB ("SGPJB")	234,897	323,520	<i>PT Shenhua Guohua PJB ("SGPJB")</i>
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")	115,416	52,191	<i>PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam")</i>
Sumber Segara Primadaya ("S2P")	81,069	165,283	<i>Sumber Segara Primadaya ("S2P")</i>
Lain-lain	<u>-</u>	<u>2,737</u>	<i>Others</i>
	<u>8,896,200</u>	<u>5,226,931</u>	
Pihak ketiga	1,157,365	971,858	<i>Third parties</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga	<u>(45,540)</u>	<u>(12,892)</u>	<i>Provision for impairment - third parties</i>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>1,111,825</u>	<u>958,966</u>	<i>Total third parties - net</i>
	<u>10,008,025</u>	<u>6,185,897</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha yang belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lancar	7,703,936	4,985,040
Lewat jatuh tempo:		
1 - 30 hari	1,072,291	427,414
31 - 60 hari	441,704	321,963
> 60 hari	<u>835,634</u>	<u>464,372</u>
	10,053,565	6,198,789

Cadangan kerugian
penurunan nilai

<u>(45,540)</u>	<u>(12,892)</u>
-----------------	-----------------

10,008,025 **6,185,897**

Pergerakan perubahan cadangan kerugian
penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal	12,892	12,892
Penambahan	<u>32,648</u>	<u>-</u>
Saldo akhir	<u><u>45,540</u></u>	<u><u>12,892</u></u>

Berdasarkan penilaian manajemen terhadap penyisihan KKE atas piutang usaha, manajemen berpendapat bahwa penyisihan KKE telah cukup untuk menutupi penurunan nilai piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Aging analysis of trade receivables not yet overdue or overdue but not impaired is as follows:

*Current
Overdue:
1 - 30 days
31 - 60 days
> 60 days*

Provision for impairment

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

*Balance at beginning
Additions*

Ending balance

Based on management's assessment of the allowance for ECL on trade receivables, management is of the opinion that the allowance for ECL is sufficient to cover impairment of trade receivables.

6. PERSEDIAAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Gas	1,088,331	25,956
Batubara	311,781	487,067
Bahan bakar	122,348	103,295
Suku cadang	<u>17,200</u>	<u>7,367</u>
	<u>1,539,660</u>	<u>623,685</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas persediaan milik Grup.

Grup tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

6. INVENTORIES

*Gas
Coal
Fuel
Spare parts*

Management believes that there is no declining value in Group's inventories.

The Group does not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG NON-USAHA

7. NON-TRADE RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Direktorat Jenderal			<i>Directorate General of Treasury</i>
Perbendaharaan Kementerian			<i>Ministry of Finance</i>
Keuangan ("Ditjen PBN")	477,356	477,356	<i>("Ditjen PBN")</i>
PLN	25,636	84,298	<i>PLN</i>
PT Adhi Guna Putera ("AGP")	16,380	24,286	<i>PT Adhi Guna Putera ("AGP")</i>
PIP	-	41,570	<i>PIP</i>
PNP	-	12,441	<i>PNP</i>
	<u>519,372</u>	<u>639,951</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai - pihak berelasi	<u>-</u>	<u>(55,797)</u>	<i>Provision for impairment - related parties</i>
Jumlah pihak berelasi - bersih	<u>519,372</u>	<u>584,154</u>	<i>Total related parties - net</i>
Pihak ketiga	158,741	75,198	<i>Third parties</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga	<u>(8,503)</u>	<u>(8,503)</u>	<i>Provision for impairment - third parties</i>
Jumlah pihak ketiga - bersih	<u>150,238</u>	<u>66,695</u>	<i>Total third parties - net</i>
	<u>669,610</u>	<u>650,849</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>(187,702)</u>	<u>(206,889)</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>481,908</u>	<u>443,960</u>	<i>Non-current portion</i>

Piutang non-usaha - pihak berelasi terutama terdiri atas piutang dari penugasan PLN, PIP, dan PNP untuk jasa transportasi batubara dan transaksi lain yang dapat ditagih kembali.

Non-trade receivables - related parties mainly consist of receivables from PLN, PIP and PNP assignment for coal transportation service and other back charges transactions.

Piutang non-usaha - pihak berelasi juga termasuk saldo sebesar Rp477.356 yang merupakan uang muka pengikatan pembelian batubara yang dibayarkan oleh Grup kepada PT Tansri Madjid Energy ("TME"). Transaksi tersebut dianggap merugikan Negara dan uang muka tersebut telah disetorkan kembali oleh Kokos Jiang selaku Direktur Utama TME pada tahun 2019 kepada kas negara melalui Ditjen PBN.

Non-trade receivables - related parties also include balances amounted Rp477,356 which represents advances paid by the Group for coal binding agreements with PT Tansri Madjid Energy ("TME"). The transactions considered causing loss to the State and these advances have already been deposited back by Kokos Jiang as President Director of TME in 2019 to the state treasury through Ditjen PBN.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Manajemen berkeyakinan bahwa uang yang telah disetorkan kembali kepada Kas Negara tersebut akan dapat dikembalikan kepada Grup. Oleh karena itu, Manajemen berpendapat bahwa tidak ada penyisihan KKE yang harus dibukukan.

As of 31 December 2024, Management believes that the advances which have been deposited back to the State Treasury will be returned to the Group. Therefore, Management believes that no ECL needs to be recorded.

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of related party transactions.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 26)	2,739,199	3,074,998	Related parties (Note 26)
Pihak ketiga	82,460	101,531	Third party
	<u>2,821,659</u>	<u>3,176,529</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>(203,550)</u>	<u>(279,032)</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>2,618,109</u>	<u>2,897,497</u>	Non-current portion

Analisis jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net lease receivables is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Piutang sewa bruto:			Gross lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	562,857	718,245	Maturity within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	2,313,064	2,409,528	Maturity within two to five years
Jatuh tempo dalam waktu lebih dari lima tahun	<u>2,893,261</u>	<u>3,448,937</u>	Maturity for more than five years
	<u>5,769,182</u>	<u>6,576,710</u>	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(2,947,523)</u>	<u>(3,400,181)</u>	Less: unrealised finance income from leases
Piutang sewa neto	<u>2,821,659</u>	<u>3,176,529</u>	Net lease receivable
Dikurangi: bagian lancar	<u>(203,550)</u>	<u>(279,032)</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>2,618,109</u>	<u>2,897,497</u>	Non-current portion

Piutang sewa bagian tidak lancar akan terealisasi dalam jangka waktu dua sampai sebelas tahun.

The non-current portion of finance lease receivables will be realised within two until eleven years.

Pada tahun 2011, BAG menyewakan kapal milik PT Jaya Samudra Karunia Shipping ("JSK") kepada PLN Unit Tanjung Jati B ("PLN TJB") melalui mekanisme subsewa. Mengacu kepada kontrak sewa dengan JSK, masa sewa akan berakhir pada 31 Desember 2025.

In 2011, BAG subleases vessel using assets leased from PT Jaya Samudra Karunia Shipping ("JSK") to PLN Unit Tanjung Jati B ("PLN TJB"). Based on the agreement with JSK which are valid until 31 December 2025.

Pada tahun 2021, BAG menyewakan dua buah kapal milik PT Lumoso Pratama Line ("Lumoso") dan PT Indah Bima Prima ("IBP") kepada PLN TJB melalui mekanisme subsewa. Mengacu kepada kontrak sewa dengan masa sewa yang berakhir pada 30 Juni 2031.

In 2011, BAG subleases two vessels using assets leased from PT Lumoso Pratama Line ("Lumoso") and PT Indah Bima Prima ("IBP") to PLN TJB. Based on the agreement which are valid until 30 June 2031.

Pada tahun 2024, BAG menghapus piutang sewa pembiayaan kepada PLN TJB sebesar Rp92.521. Penghapusan tersebut disebabkan oleh penggantian kapal yang digunakan oleh PLN TJB menjadi kapal milik BAG.

In 2024, BAG write-off finance lease receivable to PLN TJB amounting to Rp92,521. The write-off is related to the replacement of vessel used by PLN TJB with a vessel directly owned by BAG.

Di tahun 2022, PLN EG melakukan subsewa fasilitas custody flow meter station dan fasilitas kompresi gas, dengan menggunakan aset yang disewa dari PT Pelayanan Energi Batam ("PEB"), dan fasilitas pipa gas ruas PK 52 - Tanjung Batu, yang merupakan aset tetap milik PLN EG, berdasarkan perjanjian dengan PLN yang akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2047.

In 2022, PLN EG subleases its custody flow meter station facility and gas compression facility, using assets leased from PT Pelayanan Energi Batam ("PEB"), and its gas pipeline section PK 52 - Tanjung Batu facility, which are the fixed asset owned by PLN EG, based on the agreement with PLN which are valid until 30 August 2047.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Di tahun 2022, PLN EG melakukan subsewa fasilitas FSRU dengan menggunakan aset yang disewa dari PT Sulawesi Regas Satu ("SRS"), berdasarkan perjanjian dengan PLN yang akan berakhir pada tanggal 18 September 2035.

Grup tidak melakukan penyisihan KKE atas aset keuangan ini karena manajemen berpendapat bahwa penyisihan tersebut tidak material sehingga cadangan KKE tidak diperlukan.

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

In 2022, PLN EG subleases the FSRU facility using assets leased from PT Sulawesi Regas Satu ("SRS"), based on the agreement with PLN which are valid until 18 September 2035.

Group does not provide any allowance for ECL for these financial assets as management believes that provision for ECL is not material, therefore the allowance for expected credit losses is not necessary.

Refer to Note 26 for details of related party transactions.

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

31 Desember/December 2024				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan				Acquisition costs
Tanah	5,176	-	5,176	Land
Bangunan dan infrastruktur	51,278	536	64,487	Buildings and infrastructure
Instalasi dan mesin	17,354	-	17,354	Installations and machines
Perlengkapan pengolahan data	15,541	1,533	19,055	Processing equipment
Perlengkapan telekomunikasi	91	-	91	Telecommunication equipment
Perlengkapan umum	8,410	19,796	28,206	General equipment
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	2,678,633	655,662	3,334,295	Motor and moving vehicles
	2,776,483	677,527	3,468,664	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	984	98,218	84,548	Construction in progress
	2,777,467	775,745	3,553,212	
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan dan infrastruktur	(24,547)	(7,330)	(32,059)	Buildings and infrastructure
Instalasi dan mesin	(5,437)	(2,892)	(8,329)	Installations and machines
Perlengkapan pengolahan data	(12,931)	(3,450)	(16,381)	Processing equipment
Perlengkapan telekomunikasi	(91)	-	(91)	Telecommunication equipment
Perlengkapan umum	(6,494)	(818)	(7,019)	General equipment
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	(1,118,400)	(228,877)	(1,347,388)	Motor and moving vehicles
	(1,167,900)	(243,367)	(1,411,267)	
Nilai buku bersih	1,609,567		2,141,945	Net book value

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

	31 Desember/December 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition costs
Tanah	5,176	-	-	5,176	Land
Bangunan dan infrastruktur	38,313	13,694	(729)	51,278	Buildings and infrastructure
Instalasi dan mesin	34,157	-	(16,803)	17,354	Installations and machines
Perlengkapan penyaluran tenaga listrik	-	-	-	-	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data	904	168	14,469	15,541	Processing equipment
Perlengkapan telekomunikasi	-	-	91	91	Telecommunication equipment
Perlengkapan umum	4,345	-	4,065	8,410	General equipment
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	1,914,463	759,512	4,658	2,678,633	Motor and moving vehicles
	<u>1,997,358</u>	<u>773,374</u>	<u>5,751</u>	<u>2,776,483</u>	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	3,220	3,515	(5,751)	984	Construction in progress
	<u>2,000,578</u>	<u>776,889</u>	<u>-</u>	<u>2,777,467</u>	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan dan infrastruktur	(18,787)	(5,657)	(103)	(24,547)	Buildings and infrastructure
Instalasi dan mesin	(13,709)	(1,984)	10,256	(5,437)	Installations and machines
Perlengkapan penyaluran tenaga listrik	-	-	-	-	Transmission equipment
Perlengkapan pengolahan data	(889)	(3,246)	(8,796)	(12,931)	Processing equipment
Perlengkapan telekomunikasi	-	-	(91)	(91)	Telecommunication equipment
Perlengkapan umum	(4,288)	(564)	(1,642)	(6,494)	General equipment
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	(943,335)	(175,441)	376	(1,118,400)	Motor and moving vehicles
	<u>(981,008)</u>	<u>(186,892)</u>	<u>-</u>	<u>(1,167,900)</u>	
Nilai buku bersih	<u>1,019,570</u>			<u>1,609,567</u>	Net book value

Penyusutan dibebankan pada akun-akun berikut ini:

Depreciation expenses were charged to the following accounts:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban pokok penjualan	239,873	174,870	Cost of sales
Beban umum dan administrasi	<u>3,494</u>	<u>12,022</u>	General and administrative expenses
	<u><u>243,367</u></u>	<u><u>186,892</u></u>	

Pada tahun 2024, aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp2.539.161. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

In 2024, the Group's fixed assets are insured against the risk of loss, accident, fire and other risks for a total coverage of Rp2,539,161. Management believes that the total coverage insured is adequate to cover possible losses from such risks.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan atas nilai aset tetap.

As at 31 December 2024 and 2023, management believes that there was no impairment in the value of fixed assets.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET HAK GUNA

10. RIGHT-OF-USE ASSETS

Rincian aset hak-guna pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The detail of the right-of-use assets as at
31 December 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember/December 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification*)	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan:					
Tanah	-	16,369	-	-	16,369
Bangunan dan infrastruktur	54,382	2,677	-	-	57,059
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	1,544,729	1,285,974	(55,377)	52,136	2,827,462
	1,599,111	1,305,020	(55,377)	52,136	2,900,890
Akumulasi penyusutan:					
Tanah	-	(3,981)	-	-	(3,981)
Bangunan dan infrastruktur	(11,989)	(15,424)	-	-	(27,413)
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	(236,976)	(497,694)	31,195	-	(703,475)
	(248,965)	(517,099)	31,195	-	(734,869)
Nilai buku bersih	1,350,146				2,166,021

*) Reklasifikasi piutang sewa pembiayaan ke aset hak guna disebabkan oleh
penghentian transaksi subsewa

*) Reclassification of finance lease receivable to right-of-use asset due to
termination of sub-lease transactions

31 Desember/December 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan:					
Bangunan dan infrastruktur	4,788	49,594	-		54,382
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	385,422	1,274,268	(114,961)		1,544,729
	390,210	1,323,862	(114,961)		1,599,111
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan dan infrastruktur	(133)	(11,856)	-		(11,989)
Kendaraan bermotor dan alat-alat yang bergerak	(40,805)	(289,036)	92,865		(236,976)
	(40,938)	(300,892)	92,865		(248,965)
Nilai buku bersih	349,272				1,350,146

	2024	2023	
Beban pokok penjualan	488,569	279,870	Cost of sales
Beban umum dan administrasi	28,530	21,022	General and administrative expenses
	517,099	300,892	

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat
peristiwa atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai aset
hak guna secara signifikan pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023.

Based on management's assessment, there were no
events or changes in circumstances that may
significantly impair the value of right-of-use assets as
at 31 December 2024 and 2023.

11. PROPERTI PERTAMBANGAN

11. MINING PROPERTIES

31 Desember/December 2024			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan			
Pertambangan yang sedang dikembangkan	378,333	343	378,676
Pertambangan yang berproduksi	1,624,993	-	1,624,993
	2,003,326	343	2,003,669
Akumulasi amortisasi			
Pertambangan yang berproduksi	(191,916)	(47,635)	(239,551)
Nilai buku bersih	1,811,410		1,764,118

Acquisition costs

Mines under development
Mines in production

Accumulated amortisation
Mines in production

Net book value

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PROPERTI PERTAMBANGAN

11. MINING PROPERTIES

	31 Desember/December 2023			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan				Acquisition costs
Pertambangan yang sedang dikembangkan	377,791	542	378,333	Mines under development
Pertambangan yang berproduksi	1,624,993	-	1,624,993	Mines in production
	<u>2,002,784</u>	<u>542</u>	<u>2,003,326</u>	
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortisation
Pertambangan yang berproduksi	(145,723)	(46,193)	(191,916)	Mines in production
Nilai buku bersih	<u>1,857,061</u>		<u>1,811,410</u>	Net book value
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas properti pertambangan.				As at 31 December 2024 and 2023, management believes that there was no impairment in the value of mining properties.

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investments in associates are as follows:

Entitas/ <i>Entity</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Tahun operasi komersial/ <i>Commercial operation year</i>	Persentase penyertaan/ <i>Percentage of ownership</i>	
				31 Desember/ <i>December</i> 2024	31 Desember/ <i>December</i> 2023
Langsung melalui EPI/<i>Direct through EPI</i>					
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jawa Tengah/ <i>Central Java</i>	Infrastruktur gas/ <i>Gas infrastructure</i>	2012	35.00%	-
Tidak langsung melalui BBI/<i>Indirect through BBI</i>					
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>	Infrastruktur batubara/ <i>Coal infrastructure</i>	2014	25.60%	25.60%
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Sumatera Selatan/ <i>South Sumatera</i>	Infrastruktur batubara/ <i>Coal infrastructure</i>	2011	25.60%	25.60%
Tidak langsung melalui BAG/<i>Indirect through BAG</i>					
AGP	Jakarta	Pelayaran/ <i>Shipping</i>	1987	24.98%	24.98%

Pada tahun berjalan, EPI melakukan akuisisi atas saham entitas asosiasi PDG dari PIP dengan imbalan pembelian sebesar Rp93.497. Entitas induk langsung adalah PT Pertamina Gas ("Pertagas") sebagai pemegang saham mayoritas, sedangkan entitas induk utama adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina").

In the current year, EPI acquired shares of the associate entity PDG from PIP with a purchase consideration of Rp93,497. The direct parent entity is PT Pertamina Gas ("Pertagas") as the majority shareholder, and the ultimate parent entity is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina").

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The changes in investments in associate are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi/ Acquisition	Dividen/ Dividends	Bagian atas laba/(rugi) bersih/ Share in net profit/(loss)	Bagian atas Pendapatan/ (rugi) komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income/(loss)	Amortisasi penyesuaian nilai wajar/ Amortisation of fair value uplift	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2024								31 December 2024
PDG	-	93,497	-	3,740	16	-	97,253	PDG
SBL	345,074	-	-	12,632	2,875	(8,843)	351,738	SBL
MMJ	251,830	-	-	1,849	(1,494)	(7,631)	244,554	MMJ
AGP	41,293	-	(7,918)	18,283	(29)	-	51,629	AGP
	<u>638,197</u>	<u>93,497</u>	<u>(7,918)</u>	<u>36,504</u>	<u>1,368</u>	<u>(16,474)</u>	<u>745,174</u>	
31 Desember 2023								31 December 2023
SBL	335,744	-	-	18,418	(245)	(8,843)	345,074	SBL
MMJ	256,677	-	-	5,185	(2,401)	(7,631)	251,830	MMJ
AGP	36,147	-	(7,935)	13,464	(383)	-	41,293	AGP
	<u>628,568</u>	<u>-</u>	<u>(7,935)</u>	<u>37,067</u>	<u>(3,029)</u>	<u>(16,474)</u>	<u>638,197</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

The following table contains the summarised financial information for associates as at 31 December 2024 and 31 December 2023 which are accounted for using the equity method:

	31 Desember/December 2024				
	PDG	SBL	MMJ	AGP	
Jumlah aset	342,081	1,012,805	1,424,137	1,158,971	Total assets
Jumlah liabilitas	(64,216)	(536,946)	(1,243,949)	(952,295)	Total liabilities
Aset bersih	277,865	475,859	180,188	206,676	Net assets
% kepemilikan efektif	35.00%	25.60%	25.60%	24.98%	% effective ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	97,253	121,820	46,128	51,629	The Group's share of the net assets of associates
Kenaikan nilai wajar pada saat akuisisi	-	265,290	228,950	-	Fair value uplift at acquisition
Amortisasi kenaikan nilai wajar	-	(35,372)	(30,524)	-	Amortisation of fair value uplift
Jumlah tercatat	97,253	351,738	244,554	51,629	Total carrying value
Jumlah pendapatan	47,572	285,810	373,797	1,007,625	Total revenue
Jumlah laba tahun berjalan	10,686	49,345	7,224	73,188	Total income for the year
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain	47	11,229	(5,835)	(383)	Total other comprehensive income/(loss)
% kepemilikan efektif	35.00%	25.60%	25.60%	24.98%	% effective ownership
Bagian Grup atas laba tahun berjalan	3,740	12,632	1,849	18,283	The Group's share of the income for the year
Bagian Grup atas penghasilan/(rugi) komprehensif lain	16	2,875	(1,494)	(29)	The Group's share of the other comprehensive income/(loss)

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas: (lanjutan)

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)

The following table contains the summarised financial information for associates as at 31 December 2024 and 31 December 2023 which are accounted for using the equity method: (continued)

	31 Desember/December 2023			
	SBL	MMJ	AGP	
Jumlah aset	800,849	1,169,060	875,087	Total assets
Jumlah liabilitas	(385,562)	(990,259)	(709,783)	Total liabilities
Aset bersih	415,287	178,801	165,304	Net assets
% kepemilikan efektif	25.60%	25.60%	24.98%	% effective ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	106,313	45,773	41,293	The Group's share of the net assets of associates
Kenaikan nilai wajar pada saat akuisisi	265,290	228,950	-	Fair value uplift at acquisition
Amortisasi kenaikan nilai wajar	(26,529)	(22,893)	-	Amortisation of fair value uplift
Jumlah tercatat	345,074	251,830	41,293	Total carrying value
Jumlah pendapatan	416,052	357,766	761,925	Total revenue
Jumlah laba tahun berjalan	71,947	20,253	53,900	Total income for the year
Jumlah rugi komprehensif lain	(958)	(9,380)	(1,534)	Total other comprehensive loss
% kepemilikan efektif	25.60%	25.60%	24.98%	% effective ownership
Bagian Grup atas laba tahun berjalan	18,418	5,185	13,464	The Group's share of the income for the year
Bagian Grup atas rugi komprehensif lain	(245)	(2,401)	(383)	The Group's share of the other comprehensive loss

Seluruh entitas asosiasi dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for its share.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi. Manajemen juga meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi.

As at 31 December 2024 and 2023, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates. Management also believes that there is no indication of impairment for investment in associates.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA

13. TRADE PAYABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Pertamina Gas Negara ("PGN")	125,149	-	<i>PT Pertamina Gas Negara ("PGN")</i>
Pertagas	76,060	-	<i>Pertagas</i>
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	66,928	81,245	<i>PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")</i>
SBL	49,212	36,671	<i>SBL</i>
MMJ	31,881	30,228	<i>MMJ</i>
PT Pertamina Hulu Energi OSES ("PHE OSES")	31,816	-	<i>PT Pertamina Hulu Energi OSES ("PHE OSES")</i>
AGP	11,326	42,240	<i>AGP</i>
PEB	10,931	11,783	<i>PEB</i>
Lain-lain	472	36,216	<i>Others</i>
	<u>403,775</u>	<u>238,383</u>	
Pihak ketiga	<u>5,086,510</u>	<u>2,042,663</u>	<i>Third parties</i>
	<u>5,490,285</u>	<u>2,281,046</u>	

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

14. ACCRUED EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Sewa kapal jangka pendek	143,293	-	<i>Short-term vessel charter</i>
Gaji dan insentif	132,430	93,794	<i>Salaries and incentive</i>
Regasifikasi & toll fees	49,987	-	<i>Regasification & toll fees</i>
Pengupasan tanah	30,780	-	<i>Overburden</i>
Bunga pinjaman	32,438	12,669	<i>Loan interest</i>
Pengangkutan dan analisis batubara	11,931	463,085	<i>Transport and analysis of coal</i>
Jasa profesional	11,342	15,677	<i>Professional fees</i>
Lain-lain	128,189	128,503	<i>Others</i>
	<u>540,390</u>	<u>713,728</u>	

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of related party transactions.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. LIABILITAS SEWA

15. LEASE LIABILITIES

a. Berdasarkan jatuh tempo

a. Based on maturities

Nilai tunai pembayaran minimum atas liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for the lease liabilities as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pembayaran sewa minimum yang jatuh tempo dalam waktu:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	1,128,115	962,278	Not later than a year
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	3,133,626	2,787,066	More than one year and not later than five years
Lebih dari lima tahun	<u>2,081,297</u>	<u>1,808,390</u>	More than five years
Jumlah pembayaran minimum sewa	6,343,038	5,557,734	Total minimum lease payments
Dikurangi: bunga	<u>(1,658,916)</u>	<u>(1,445,732)</u>	Less: interest
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	4,684,122	4,112,002	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(778,725)</u>	<u>(652,076)</u>	Less: current maturities
Bagian jangka panjang	<u>3,905,397</u>	<u>3,459,926</u>	Long-term maturities

b. Berdasarkan pemberi sewa

b. Based on lessor

Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang:

The amount of future minimum lease payments:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			Related parties
PEB	61,457	118,685	PEB
Pihak ketiga			Third parties
SRS	1,511,046	1,596,225	SRS
PT Lintas Samudera Shipping ("LSS")	1,089,534	-	PT Lintas Samudera Shipping ("LSS")
Lumoso	524,932	600,029	Lumoso
Konsorsium PT Pelita Bara Samudera dan Prima Maritim Bahari	376,033	490,266	Konsorsium PT Pelita Bara Samudera and PT Prima Maritim Bahari
IBP	362,853	398,975	IBP
Lain-lain	758,267	907,822	Others
	<u>4,684,122</u>	<u>4,112,002</u>	
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(778,725)</u>	<u>(652,076)</u>	Less: current maturities
Bagian jangka panjang	<u>3,905,397</u>	<u>3,459,926</u>	Long-term maturities

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. UTANG LAIN-LAIN

16. OTHER PAYABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PLN	3,884,901	2,342,121	PLN
SBL	1,949	1,949	SBL
PNP	622	1,092	PNP
PIP	246	913	PIP
PT Haleyora Powerindo ("HPI")	-	1,689	PT Haleyora Powerindo ("HPI")
Energy Management Indonesia	-	531	Energy Management Indonesia
Lain-lain	3,841	671	Others
	<u>3,891,559</u>	<u>2,348,966</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Selaras Indah Pratama	87,377	87,377	PT Selaras Indah Pratama
PT Energi Prima Karunia	27,710	27,710	PT Energi Prima Karunia
PT Prima Multi Artha	27,189	27,189	PT Prima Multi Artha
Lain-lain	3,941	43,129	Others
	<u>146,217</u>	<u>185,405</u>	
	<u>4,037,776</u>	<u>2,534,371</u>	
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(3,893,451)</u>	<u>(2,390,146)</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>144,325</u>	<u>144,225</u>	<i>Non-current portion</i>

Fasilitas Notional Pooling ("Notional Pooling")

Pada tanggal 13 Agustus 2021, Grup melakukan Perjanjian Pelayanan Jasa *Notional Pooling* dengan PLN dan Bank BNI. Adapun perjanjian ini adalah untuk menyediakan layanan manajemen integrasi kas dalam rangka memfasilitasi kebutuhan PLN grup guna mengelola likuiditas keuangan secara efisien. Saldo *Notional Pooling* Grup per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.769.798 (2023: Rp2.182.092). Perjanjian ini tidak mengatur pembatasan yang harus dipenuhi Grup dan tidak dijamin dengan aset tertentu yang dimiliki Grup.

PT Selaras Indah Pratama

Pinjaman kepada PT Selaras Indah Pratama berdasarkan perjanjian novasi antara BKL, PT Atlas Resources Tbk., dan PT Selaras Indah Pratama pada tanggal 9 Januari 2019. Pinjaman ini bertujuan untuk kepentingan operasional BKL. Grup mengkategorikan pinjaman ini sebagai liabilitas jangka panjang.

PT Energi Prima Karunia dan PT Prima Multi Artha

Pinjaman dari PT Energi Prima Karunia dan PT Prima Multi Artha adalah pinjaman PBI untuk pembelian tanah. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 0,3% dan akan jatuh tempo pada tahun 2028. Grup mengkategorikan pinjaman ini sebagai liabilitas jangka panjang.

Notional Pooling Facility ("Notional Pooling")

On 13 August 2021, Group entered into Notional Pooling agreements with PLN and Bank BNI. This agreement purpose is to provide integrated cash management services to facilitate the PLN Group's needs in managing financial liquidity efficiently. As at 31 December 2024, the Notional Pooling balance amounting to Rp3,769,798 (2023: Rp2,182,092). This agreement does not impose any restrictions on the Group and is not secured by any specific assets owned by the Group.

PT Selaras Indah Pratama

Loan to PT Selaras Indah Pratama was based on novation agreement between BKL, PT Atlas Resources Tbk., and PT Selaras Indah Pratama. This loan represents loan for operational purposes of BKL. The Group categorised this loan as non-current liabilities.

PT Energi Prima Karunia and PT Prima Multi Artha

Loan to PT Energi Prima Karunia and PT Prima Multi Artha is PBI's loan for land purchase. This loan bears interest at 0.3% and will be due in 2028. The Group categorised this as non-current portion liabilities.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PINJAMAN PEMEGANG SAHAM

17. SHAREHOLDER LOAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
PLN	1,599,698	1,749,915	PLN
Perubahan nilai wajar pinjaman pemegang saham	<u>(113,968)</u>	<u>(157,248)</u>	Changes in fair value of shareholder loan
	<u>1,485,730</u>	<u>1,592,667</u>	
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(255,245)</u>	<u>(228,525)</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u><u>1,230,485</u></u>	<u><u>1,364,142</u></u>	Non-current portion

Pinjaman kepada pemegang saham digunakan untuk kegiatan investasi Grup, dengan rincian sebagai berikut:

Shareholder loan used for the Group's investment activities, with details as follows:

<u>Investasi/Investment</u>	<u>31 Desember/ December 2024</u>	<u>31 Desember/ December 2023</u>	<u>Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>
Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") MT Jambi 1	282,547	353,184	0.3%	2029
Joint-Operation ("JO") Sumatera	201,521	251,902	0.3%	2028
PLTU Sumatera	48,789	57,571	0.3%	2028
Saham PDG	101,477	-	7.26%	2030
Tug & Barge	75,758	81,900	8.65%	2034
SHL 5	84,874	100,775	8.63%	2030
SHL 6	509,102	566,877	8.67%	2032
Tanjung Batu Gas Pipeline Project 1	179,956	205,568	0.20%	2029
Tanjung Batu Gas Pipeline Project 2	<u>115,674</u>	<u>132,138</u>	8.70%	2030
	<u><u>1,599,698</u></u>	<u><u>1,749,915</u></u>		

Di tahun 2020, Perusahaan mendapat surat persetujuan dari PLN untuk menurunkan bunga pinjaman menjadi 0,3% per tahun. Atas transaksi ini, Perusahaan mencatat selisih nilai wajar pinjaman pemegang saham pada akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp462.171.

In 2020, the Company obtained an approval letter from PLN to reduce the loan interest rate to 0.3% per annum. For this transaction, the Company recorded the difference in fair value of shareholder loan as equity account under additional paid-in capital amounted to Rp462,171.

Pada tahun 2022, Perusahaan mencatat penyesuaian atas perubahan selisih nilai wajar pinjaman pemegang saham sebesar Rp93.294 karena pembayaran kembali lebih awal. Pada tanggal 31 Desember 2022, selisih nilai wajar pinjaman pemegang saham yang dicatat sebagai tambahan modal disetor adalah sebesar Rp368.877.

In 2022, the Company recorded adjustment due to changes in the difference in fair value of shareholder loan amounted to Rp93,294 due to early repayment. As at 31 December 2022, the difference in fair value of shareholder loan recorded under additional paid-in capital is Rp368,877.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pajak penghasilan</u>			<u>Corporate income tax</u>
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
2022	-	34,813	2022
	-	34,813	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
2024	128,730	-	2024
2023	115,302	6,880	2023
2021	-	6,413	2021
2019	-	5,660	2019
	<u>244,032</u>	<u>18,953</u>	
	<u>244,032</u>	<u>53,766</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>(99,050)</u>	<u>-</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>144,982</u>	<u>53,766</u>	<i>Non-current portion</i>
<u>Pajak lain-lain</u>			<u>Other taxes</u>
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak pertambahan nilai	18,526	26,301	Value added tax
Lain-lain	<u>298</u>	<u>298</u>	Others
	<u>18,824</u>	<u>26,599</u>	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak pertambahan nilai	939,989	286,750	Value added tax
Lain-lain	<u>45,513</u>	<u>154,188</u>	Others
	<u>985,502</u>	<u>440,938</u>	
	<u>1,004,326</u>	<u>467,537</u>	
Dikurangi: bagian lancar	<u>(332,081)</u>	<u>(74,712)</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>672,245</u>	<u>392,825</u>	<i>Non-current portion</i>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pajak penghasilan</u>			<u>Corporate income tax</u>
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
- Pasal 29	89,581	92,232	Article 29 -
- Pasal 25	<u>7,686</u>	<u>-</u>	Article 25 -
	<u>97,267</u>	<u>92,232</u>	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
- Pasal 29	19,550	48,450	Article 29 -
- Pasal 25	<u>1,366</u>	<u>62</u>	Article 25 -
	<u>20,916</u>	<u>48,512</u>	
	<u>118,183</u>	<u>140,744</u>	
<u>Pajak lain-lain</u>			<u>Other taxes</u>
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
- Pajak pertambahan nilai	9,167	47,835	Value added tax -
- Pasal 22	-	42	Article 22 -
- SKPKB	-	31,963	SKPKB -
- Lain-lain	<u>14,027</u>	<u>15,326</u>	Others -
	<u>23,194</u>	<u>95,166</u>	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
- Pajak pertambahan nilai	290,745	70,998	Value added tax -
- Pasal 15	34,265	22,269	Article 15 -
- Lain-lain	<u>17,180</u>	<u>16,964</u>	Others -
	<u>342,190</u>	<u>110,231</u>	
	<u>365,384</u>	<u>205,397</u>	

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pajak penghasilan:</u>			<u>Corporate income tax:</u>
Kini	439,548	241,582	Current -
Tangguhan	<u>7,833</u>	<u>4,673</u>	Deferred -
	<u>447,381</u>	<u>246,255</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perhitungan pajak teoritis atas laba sebelum pajak konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expense and the theoretical tax amount on the Group's consolidated profit before tax is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Laba sebelum pajak konsolidasian	2,684,466	1,698,400	<i>Consolidated profit before tax</i>
Pajak yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	590,582	373,648	<i>Income tax calculated at applicable tax rate</i>
Penghasilan keuangan yang dikenakan pajak final	(5,560)	(880)	<i>Finance income subjected to final tax</i>
Pendapatan yang dikoreksi secara pajak	(195,209)	(188,955)	<i>Revenue corrected for fiscal purposes</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	30,765	49,488	<i>Non-deductible expenses</i>
Aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang tidak diakui entitas anak	26,803	12,954	<i>Unrecognised deferred tax assets from tax loss carryforward - subsidiaries</i>
	<u>447,381</u>	<u>246,255</u>	

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

<u>31 Desember/December 2024</u>				
Saldo awal/ <i>Beginning balances</i>	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ <i>(Charged)/ credited to profit or loss</i>	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balances</i>	
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Penyusutan	(331)	-	(331)	<i>Depreciation</i>
Penurunan nilai atas uang muka	35,328	-	35,328	<i>Impairment of advances</i>
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	2,592	-	2,592	<i>Provision for environmental and mine closure</i>
Penyisihan kerugian piutang lain-lain	680	-	680	<i>Loss allowances for other receivables</i>
Sewa	(5,488)	638	(4,850)	<i>Leases</i>
Liabilitas imbalan pascakerja	3,216	(1,613)	4,767	<i>Post-employment benefit liabilities</i>
	<u>35,997</u>	<u>(975)</u>	<u>3,164</u>	<u>38,186</u>
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Sewa	(9)	(6,858)	(6,867)	<i>Leases</i>
Liabilitas imbalan pascakerja	423	-	423	<i>Post-employment benefit liabilities</i>
Aset tetap	(4,485)	-	(4,485)	<i>Fixed asset</i>
	<u>(4,071)</u>	<u>(6,858)</u>	<u>-</u>	<u>(10,929)</u>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

31 Desember/December 2023				
Saldo awal/ Beginning balances	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balances	
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Penyusutan	(331)	-	(331)	Depreciation
Penurunan nilai atas uang muka	35,328	-	35,328	Impairment of advances
Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang	2,592	-	2,592	Provision for environmental and mine closure
Penyisihan kerugian piutang lain-lain	680	-	680	Loss allowances for other receivables
Sewa	(1)	(5,487)	(5,488)	Leases
Liabilitas imbalan pascakerja	2,261	814	3,216	Post-employment benefit liabilities
	40,529	(4,673)	141	35,997
Liabilitas pajak tangguhan				Deferred tax liabilities
Sewa	(9)	-	(9)	Leases
Liabilitas imbalan pascakerja	423	-	423	Post-employment benefit liabilities
Aset tetap	(4,485)	-	(4,485)	Fixed asset
	(4,071)	-	(4,071)	

e. Audit pajak

e. Tax audit

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan BBN telah mengajukan banding atas hasil pemeriksaan pajak PPN tahun pajak 2020 dan 2021, BBN juga dalam proses audit pajak badan tahun 2023.

As of the date of this consolidated financial statement, the Company and BBN had filed an appeal against the conclusions of the 2020 and 2021 VAT tax audit, and BBN was also conducting a 2023 corporate tax audit.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerima penolakan permohonan pengurangan dan pembatalan atas STP PPN tahun 2020, atas penolakan tersebut Perusahaan berencana mengajukan gugatan pada 2025.

As of the date of these consolidated financial statement, the Company had received a request for the reduction and cancellation of the 2020 VAT STP, in response to the rejection, the Company offered a lawsuit to settle the tax in 2025.

Manajemen telah melakukan analisis terhadap posisi perpajakannya dan berkeyakinan bahwa hasil akhir dari audit dan pemeriksaan pajak di atas tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

Management has reviewed its tax position and thinks that the outcome of the tax audits and examinations will not have a major negative impact on the Group's financial position or cash flows.

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Grup telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp119.560 (2023: Rp179.642) atas PPh badan dan pajak lainnya.

During the year ended 31 December 2024, the Group has received tax refunds amounting to Rp119,560 (2023: Rp179,642) for CIT and other taxes.

f. Tarif pajak

f. Tax rate

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak yang berada di dalam Grup menghitung dan menyetorkan besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

h. Aturan Model Pilar Dua *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD")

Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perseroan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dikarenakan PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki eksposur atas pajak kini. Grup menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait pajak penghasilan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam amendemen terhadap PSAK 212 "Pajak Penghasilan" yang diterbitkan pada bulan Desember 2023.

Grup sedang dalam proses menilai apakah mereka termasuk dalam cakupan model Pilar Dua dan terdapat eksposur terhadap PMK-136 saat PMK-136 diberlakukan. Dikarenakan kompleksitas dalam penerapan PMK-136 dan perhitungan pendapatan *Global Anti-Base Erosion* ("GloBE") dampak PMK-136 yang telah diundangkan belum dapat diperkirakan secara wajar.

18. TAXATION (continued)

g. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and the companies within the Group submit tax returns on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

h. *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD") Pillar Two Model Rules

Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules The Ministry of Finance ("MoF") Regulation No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025. Since the PMK-136 was not effective at the reporting date, the Group has no related current tax exposure. The Group applies the exception to recognise and disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes, as provided in the amendment to PSAK 212 "income Taxes" issued in December 2023.

The Group is in the process of assessing whether they are within the scope of Pillar Two model and if there is any exposure to the PMK-136 for when PMK-136 comes into effect. Due to the complexities in applying the PMK-136 and calculating Global Anti-Base Erosion ("GloBE") income, the quantitative impact of the enacted PMK-136 is not yet reasonably estimable.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

Komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's share capital on 31 December 2024 and 2023 is as follows:

Nama pemegang saham/ Name of shareholders	Jumlah saham/Number of share*)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-up share capital
PLN	2,298,716	99.99%	2,298,716
YPK PLN	1	0.01%	1
	2,298,717	100%	2,298,717

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

Cadangan wajib

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib sampai cadangan menjadi paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu tertentu yang ditetapkan untuk pembentukan cadangan wajib tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan belum membentuk cadangan wajib tersebut.

Statutory reserve

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 introduced in August 2007, requires the Company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of issued and paid-up capital. There is no set period of time over which this reserve should be established. On 31 December 2024 and 2023, the Company has not yet established the statutory reserve.

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

20. NON-CONTROLLING INTERESTS

	31 Desember/December 2024			
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba/(rugi), bersih/Share in net profit/(loss)	Saldo akhir/ Ending balance	
JPC	391,226	(12,552)	378,674	JPC
BKL	333,785	1,342	335,127	BKL
BBi	75,285	(182)	75,103	BBi
BAG	90	97	187	BAG
PLN EG	58	3	61	PLN EG
	800,444	(11,292)	789,152	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

20. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

	31 Desember/December 2023			
	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian atas laba/(rugi), bersih/Share in net profit/(loss)	Saldo akhir/ Ending balance	
JPC	398,843	(7,617)	391,226	JPC
BKL	333,654	131	333,785	BKL
BBI	75,732	(447)	75,285	BBI
BAG	-	90	90	BAG
PLN EG	-	58	58	PLN EG
	808,229	(7,785)	800,444	

21. PENJUALAN

21. SALES

	2024	2023	
Penjualan gas	24,418,692	5,044,522	Sales of gas
Penjualan batubara	9,885,486	7,613,031	Sales of coal
Sewa kapal	5,579,447	5,776,304	Vessel charter
Jasa manajemen	1,436,530	1,109,552	Management fee
Lain-lain	587,847	683,900	Others
	41,908,002	20,227,309	

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of related party transactions.

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

22. COST OF SALES

	2024	2023	
Beban langsung:			Direct costs:
Sewa kapal jangka pendek	3,350,697	3,423,549	Short-term vessel charter
Transportasi	2,852,283	2,298,602	Transportation
Regasifikasi & toll fees	2,338,215	690,098	Regasification & toll fees
Depresiasi	728,442	454,740	Depreciation
Bahan bakar	561,128	359,599	Fuel
Pengupasan tanah	328,231	430,729	Overburden
Gaji dan insentif	250,463	207,476	Salaries and incentive
Bongkar muat	98,684	216,954	Stevedoring
Royalti	75,815	64,739	Royalty
Lain-lain	327,859	696,371	Others
	10,911,817	8,842,857	
Persediaan awal tahun	623,685	391,863	Beginning inventories
Pembelian persediaan	27,977,270	8,873,771	Purchases of inventories
Persediaan akhir tahun	(1,539,660)	(623,685)	Ending inventories
	37,973,112	17,484,806	

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of related party transactions.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban kepegawaian	241,261	202,531	Employee expenses
Beban administrasi	148,659	99,983	Administration expenses
Beban pemeliharaan	41,220	36,479	Maintenance expenses
Depresiasi	32,025	33,044	Depreciation
Lain-lain	7,368	13,345	Others
	<u>470,533</u>	<u>385,382</u>	

24. BEBAN KEUANGAN

24. FINANCE EXPENSE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Liabilitas sewa	375,591	304,002	Lease liabilities
Notional Pooling	238,107	36,754	Notional Pooling
Pinjaman pemegang saham	135,850	160,475	Shareholders loans
	<u>749,548</u>	<u>501,231</u>	

25. BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH

25. OTHER EXPENSES, NET

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Penalti	93,038	44,467	Penalties
Amortisasi kenaikan nilai wajar (Catatan 12)	16,474	16,474	Amortisation of fair value uplift (Note 12)
(Pendapatan)/beban lain-lain, bersih	(15,572)	143,756	Other (income)/expenses, net
	<u>93,940</u>	<u>204,697</u>	

26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan berelasi

Nature of related parties

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan BUMN lainnya.
- PLN dan YPK PLN merupakan pemegang saham Grup.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

- The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PLN and other SOEs.
- PLN and YPK PLN are the shareholders of the Group.
- The Board of Commissioner and Directors are the key management of the Company and its subsidiaries.

Transaksi pihak berelasi

Transactions with related parties

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

Below is the list of related parties with which the Group has transactions:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationship</u>	<u>Sifat transaksi/ Nature of transactions</u>
PLN	Entitas induk Perusahaan/ Parent entity of the Company	Piutang usaha, piutang non-usaha, piutang sewa pembiayaan, utang lain-lain, biaya dibayar di muka, pinjaman pemegang saham dan penjualan/Trade receivables, non-trade receivables, finance lease receivable, other payables, accrued expense, shareholder loan, and sales

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki
transaksi dengan Grup: (lanjutan)

*Below is the list of related parties with which the Group
has transactions: (continued)*

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
PNP	Entitas sepengendali/Entity under common control	Piutang usaha, piutang non-usaha, piutang sewa pembiayaan, utang lain-lain, dan penjualan/Trade receivable, non-trade receivable, finance lease receivable, other payable and sales
PIP	Entitas sepengendali/Entity under common control	Piutang usaha, piutang non-usaha, piutang sewa pembiayaan, utang lain-lain, dan penjualan/Trade receivable, non-trade receivable, finance lease receivable
ICON+	Entitas sepengendali/Entity under common control	Biaya masih harus dibayar, beban pokok penjualan dan biaya umum dan administrasi/Accrued expense, cost of sales, general and administrative expense
PLN Batam	Entitas sepengendali/Entity under common control	Piutang usaha dan penjualan/Trade receivables and sales
SGPJB	Ventura bersama PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan/Joint venture of PNP, entity under common control	Piutang usaha dan penjualan/Trade receivables and sales
S2P	Entitas asosiasi PNP, entitas sepengendali dengan Perusahaan/Associate of PNP, entity under common Control	Piutang usaha dan penjualan/Trade receivables and sales
HPI	Entitas anak PT Haleyora Power, entitas sepengendali dengan Perusahaan/Subsidiary of PT Haleyora Power, entity under common control	Utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, beban pokok penjualan dan biaya umum dan administrasi/Other payable, accrued expense, cost of sales, general and administrative expense
Energy Management Indonesia	Entitas sepengendali/Entity under common control	Utang lain-lain dan beban pokok penjualan/ Other payable and cost of sales
SBL	Entitas asosiasi/Associate	Investasi pada entitas asosiasi, utang usaha, utang lain-lain dan penjualan/Investment in associate, trade payable, other payable and sales
PT PLN Nusa Daya	Entitas sepengendali/Entity under common control	Utang lain-lain dan beban pokok penjualan/ Other payable and cost of sales

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki
transaksi dengan Grup: (lanjutan)

*Below is the list of related parties with which the Group
has transactions: (continued)*

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
MMJ	Entitas asosiasi/Associate	Investasi pada entitas asosiasi dan utang usaha/ <i>Investment in associate, trade payable</i>
AGP	Entitas asosiasi/Associate	Piutang non-usaha, investasi pada asosiasi, utang usaha, biaya masih harus dibayar, dan beban pokok penjualan/ <i>Non-trade receivable, investment in associate, trade payable, accrued expense and cost of sales</i>
Pertamina	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable and cost of sales</i>
PGN	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable and cost of sales</i>
PT Nusantara Regas ("NR")	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable and cost of sales</i>
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable and cost of sales</i>
Patra Niaga	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable, cost of sales</i>
Pertagas	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable, cost of sales</i>
PHE OSES	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Utang usaha dan beban pokok penjualan/ <i>Trade payable, cost of sales</i>
PEB	Entitas anak PLN Batam, Entitas sepengendali dengan Perusahaan/ <i>Subsidiary of PLN Batam, entity under common control</i>	Piutang usaha, utang usaha, liabilitas sewa, biaya umum dan administrasi/ <i>Trade receivable, trade payable, lease liabilities, general and administrative expense</i>
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("SI")	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban pokok penjualan/ <i>Accrued expense and cost of sales</i>

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki
transaksi dengan Grup: (lanjutan)

*Below is the list of related parties with which the Group
has transactions: (continued)*

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia ("Sucofindo")	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban pokok penjualan/ <i>Accrued expense and cost of sales</i>
PT Transportasi Gas Indonesia ("TGI")	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Biaya masih harus dibayar dan beban pokok penjualan/ <i>Accrued expense and cost of sales</i>
Bank Mandiri	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash and equivalents</i>
Bank BNI	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash and equivalents</i>
Bank BRI	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents and placement of restricted cash and equivalents</i>
Bank BSI	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
Ditjen PBN	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government related entity</i>	Piutang non-usaha/ <i>Non-trade receivable</i>

Saldo dan transaksi pihak berelasi

Balances and transactions with related parties

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak
diungkapkan pada bagian lain dalam laporan
keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut:

*Related party balances and transactions not disclosed
elsewhere in these consolidated financial statements
are as follows:*

	2024	2023	
Piutang sewa pembiayaan			Finance lease receivable
PNP	1,526,691	1,657,359	PNP
PIP	471,881	483,141	PIP
PLN	740,627	934,498	PLN
	<u>2,739,199</u>	<u>3,074,998</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Saldo dan transaksi pihak berelasi (lanjutan)

**Balances and transactions with related parties
(continued)**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak
diungkapkan pada bagian lain dalam laporan
keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

*Related party balances and transactions not disclosed
elsewhere in these consolidated financial statements
are as follows: (continued)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Biaya yang masih harus dibayar			Accrued expenses
Pertagas	49,987	-	Pertagas
ICON+	15,849	6,115	ICON+
HPI	6,712	9,716	HPI
PLN	-	6,316	PLN
Lain-lain	3,567	1,519	Others
	<u>76,115</u>	<u>23,666</u>	
Penjualan			Sales
Penjualan gas			Sales of gas
PNP	13,654,251	3,662,377	PNP
PIP	8,431,607	1,349,173	PIP
PLN	2,102,819	32,972	PLN
PLN Batam	230,015	-	PLN Batam
	<u>24,418,692</u>	<u>5,044,522</u>	
Penjualan batubara			Sales of coal
PIP	1,814,944	1,414,067	PIP
PNP	1,693,803	786,607	PNP
PLN	617,365	510,033	PLN
SGPJB	232,690	1,268,730	SGPJB
S2P	225,230	686,051	S2P
PLN Batam	210,252	212,122	PLN Batam
Lain-lain	15,628	139,054	Others
	<u>4,809,912</u>	<u>5,016,664</u>	
Sewa kapal			Vessel charter
PIP	2,459,367	2,634,939	PIP
PNP	1,847,736	1,770,531	PNP
PLN	748,485	935,834	PLN
Lain-lain	130,040	157,557	Others
	<u>5,185,628</u>	<u>5,498,861</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Saldo dan transaksi pihak berelasi (lanjutan)

**Balances and transactions with related parties
(continued)**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang tidak
diungkapkan pada bagian lain dalam laporan
keuangan konsolidasian ini adalah sebagai berikut
(lanjutan):

*Related party balances and transactions not disclosed
elsewhere in these consolidated financial statements
are as follows (continued):*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Penjualan (lanjutan)			Sales (continued)
Jasa manajemen			Management fee
PLN	614,048	476,678	PLN
PIP	444,308	308,495	PIP
PNP	359,012	324,856	PNP
Lain-lain	17,335	-	Others
	<u>1,434,703</u>	<u>1,110,029</u>	
Lain-lain			Others
PNP	320,079	382,351	PNP
PIP	143,251	146,134	PIP
PLN	109,227	138,841	PLN
	<u>572,557</u>	<u>667,326</u>	
Beban pokok penjualan			Cost of sales
Pertamina	10,465,830	3,702,712	Pertamina
PGN	887,888	194,672	PGN
Patra Niaga	710,485	479,912	Patra Niaga
Pertagas	605,076	267,109	Pertagas
NR	548,211	94,465	NR
AGP	327,037	45,353	AGP
PAG	308,774	93,147	PAG
SBL	50,606	-	SBL
MMJ	47,128	-	MMJ
TGI	24,333	-	TGI
HPI	15,473	15,294	HPI
SI	1,267	11,494	SI
ICON+	1,155	10,401	ICON+
Lain-lain	6,545	9,668	Others
	<u>13,999,808</u>	<u>4,924,227</u>	
Biaya umum dan administrasi			General and administrative expenses
PEB	90,523	117,375	PEB
ICON+	27,209	17,408	ICON+
HPI	19,505	19,228	HPI
Lain-lain	5,702	5,680	Others
	<u>142,939</u>	<u>159,691</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Kebijakan harga Perusahaan dan entitas anak yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.858 dan Rp38.316.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

***Balances and transactions with related parties
(continued)***

The Company and subsidiaries pricing policy related to transactions with related parties is set based on contracted prices.

Total compensation of the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2024 and 2023 were Rp49,858 and Rp38,316, respectively.

All of the remunerations to the Company's Board of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI**

a. Perjanjian jasa pelayanan energi primer

Perusahaan

Sebagai tindak lanjut pembentukan Perusahaan sebagai *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, PLN, PIP, dan PNP menunjuk Perusahaan untuk menyediakan jasa manajemen pengadaan dan penyediaan energi primer beserta infrastrukturnya efektif sejak tanggal 1 Januari 2023. Jasa tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penyediaan, pengiriman dan logistik penyediaan energi primer sesuai dengan instruksi dari PLN, PIP, dan PNP.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES**

a. Primary energy service provider agreement

The Company

As a follow-up to the establishment of the Company as a subholding in the primary energy procurement and logistics sector, PLN, PIP and PNP appointed the Company to provide management services for procurement and supply of primary energy and its infrastructure effective from 1 January 2023. These services include planning, procurement, supply, delivery and logistics of primary energy supply in accordance with instructions from PLN, PIP and PNP.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

b. Perjanjian penjualan gas

Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan melanjutkan perjanjian penjualan hasil regasifikasi gas bumi ("LNG") ke PLN, PIP, dan PNP. Perusahaan juga melanjutkan perjanjian penjualan gas pipa dengan PNP untuk PLTU Gresik dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap ("PLTGU") Sengkang. Pada tahun 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian penjualan gas pipa dengan PLN untuk Pembangkit Sumatera Tengah, dengan PIP untuk PLTGU Cilegon dan dengan PNP untuk pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Duri.

c. Perjanjian pembelian gas

Perusahaan

Pada tanggal 4 Januari 2023, Perusahaan, PLN dan Pertamina menandatangani amendemen perjanjian pembelian LNG yang berlaku hingga 31 Desember 2023. Dalam amendemen tersebut terdapat penambahan pihak atas perjanjian induk jual beli LNG yang menyatakan bahwa penetapan alokasi besaran volume dan harga gas yang telah diberikan kepada PLN dapat digunakan oleh Perusahaan. Kontrak pembelian gas tersebut diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Pada tanggal 6 Agustus 2024, Perusahaan, PLN dan BP Berau Ltd. menandatangani novasi dan amandemen perjanjian pembelian LNG yang berlaku hingga 30 Juni 2034. Dalam amendemen tersebut terdapat penambahan pihak atas perjanjian induk jual beli LNG yang menyatakan bahwa penetapan alokasi besaran volume dan harga gas yang telah diberikan kepada PLN dapat digunakan oleh Perusahaan.

Terkait pemenuhan kebutuhan pasokan gas bumi PLTGU Sengkang milik PNP, Perusahaan telah mengadakan perjanjian pembelian gas bumi dengan PT Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd. ("EEES") dan PT Energi Maju Abadi ("EMA"). Perjanjian tersebut berlaku mulai 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2030.

Terkait pemenuhan kebutuhan pasokan gas bumi PLTGU Gresik milik PNP, Perusahaan telah mengadakan perjanjian pembelian gas bumi dengan Husky-CNOOC Madura Limited ("HCML"). Perjanjian tersebut telah diperpanjang dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

b. Gas sales agreement

The Company

As of 31 December 2024, the Company continued a regasified liquefied natural gas ("LNG") sales agreement to PLN, PIP, and PNP. The Company also continued a pipeline gas sales agreement with PNP for its Steam Power Plant ("SPP") Gresik and Combined Cycle Power Plant ("CCPP") Sengkang. In 2024, the Company entered pipeline gas sales agreement with PLN for the Central Sumatra Plant, with PIP for the PLTGU Cilegon, and with PNP for the Gas Engine Power Plant ("GEPP") Duri.

c. Gas purchase agreements

The Company

On 4 January 2023, the Company, PLN and Pertamina entered into an amendment to the LNG purchase agreement which effective until 31 December 2023. This amendment includes the addition of party to the master LNG sale and purchase agreement stating that the allocation of volume and gas prices previously given to PLN can be utilised by the Company. The purchase agreement has been extended until 31 December 2025.

On 6 August 2024, the Company, PLN and BP Berau Ltd. entered into a novation and amendment of the LNG purchase agreement, which effective until 30 June 2034. The amendment includes the addition of parties to the master LNG sales agreement, stating that the allocation of volume and gas prices previously given to PLN can be utilised by the Company.

In relation to the fulfillment of natural gas supply needs for CCPP Sengkang owned by PNP, the Company entered into a natural gas purchase agreement with PT Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd. ("EEES") and PT Energi Maju Abadi ("EMA"). The agreement is effective from 1 July 2023 to 31 December 2030.

In relation to the fulfillment of natural gas supply needs for CCPP Gresik owned by PNP, the Company entered into a natural gas purchase agreement with Husky-CNOOC Madura Limited ("HCML"). The agreement has been extended and effective until 31 January 2025.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

c. Perjanjian pembelian gas (lanjutan)

Perusahaan

Terkait pemenuhan kebutuhan pasokan gas bumi Pembangkit Sumatera Tengah dan PLTMG Duri, Perusahaan telah mengamandemen dan menovasikan perjanjian pembelian gas bumi oleh PLN dengan Medco E&P Grissik Ltd pada tanggal 19 Desember 2023 dan berlaku sampai dengan 1 Januari 2029.

Terkait pemenuhan kebutuhan pasokan gas bumi PLTGU Cilegon, Perusahaan telah mengadakan perjanjian pembelian gas oleh dengan PT Pertamina Hulu Energi OSES pada tanggal 31 Oktober 2024 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2029.

d. Perjanjian jasa pertambangan

Beberapa entitas anak mengadakan perjanjian jasa pertambangan dengan beberapa kontraktor untuk mendukung kegiatan operasi pertambangan. Para kontraktor akan menyediakan peralatan, tenaga kerja dan perlengkapan lainnya untuk mendukung jasa mereka. Setiap perjanjian mengatur antara lain mengenai harga per unit, penyesuaian harga bahan bakar, perhitungan *rise and fall*, perhitungan *overhaul*, insentif untuk kontraktor, penalti atas *shortfall*, pengangkutan batubara dan syarat lainnya. Nilai kontrak tergantung dari jumlah volume pengupasan tanah ataupun batubara yang diangkut sesuai dengan perjanjian terkait.

Kontrak signifikan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

c. Gas purchase agreements (continued)

The Company

In relation to the fulfillment of natural gas supply needs for the Central Sumatra Power Plant and GEPP Duri, the Company has amended and novated the natural gas purchase agreement between PLN and Medco E&P Grissik Ltd on 19 December 2023, which is effective until 1 January 2029.

In relation to the fulfillment of natural gas supply needs for the CCP Cilegon, the Company entered into a natural gas purchase agreement with PT Pertamina Hulu Energi OSES on 31 October 2024, which is effective until 31 December 2029.

d. Mining purchase contracts

The Company's subsidiaries entered into various mining service contracts to support their mining operations. The contractors will provide all equipment, manpower and other supplies necessary for them to perform the mining services. Each agreement governs, among others, the unit rate, fuel price adjustment, rise and fall calculation, overhaul calculation, incentives for the contractors, shortfall penalties, coal hauling and other terms. Contract values are dependent on volumes of overburden moved and/or hauled and equipment rented, as per the relevant agreement.

Significant contracts in place at 31 December 2024 are as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Kontraktor/ Contractors	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/Contract period end
JPC	PT Megah Bara Sejahtera	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Overburden removal and mining service</i>	29 Juli/ July 2022	31 Juli/ July 2025*)
BKL	PT Ulima Nitra	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Overburden removal and mining service</i>	7 Oktober/ October 2020	26 Mei/ May 2025*)
BKL	PT Cahaya Riau Mandiri	Jasa pengupasan lapisan tanah dan jasa penambangan/ <i>Overburden removal and mining service</i>	18 April/ April 2022	17 April/ 17 April 2025

*) Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi Grup, amandemen kontrak masih dalam proses perpanjangan.

*) As at the date of the Group's consolidated financial statement, the contract amendment is still in the extension process.

e. Perjanjian penjualan batubara

BBN, JPC, dan BKL

Pada tanggal 31 Desember 2024, BBN, JPC, dan BKL memiliki komitmen untuk menjual 8 juta metrik ton batubara kepada beberapa pembeli. Penjualan batubara ini akan dilakukan selama periode mulai Januari 2024 sampai dengan November 2025.

e. Coal sales agreements

BBN, JPC and BKL

As of 31 December 2024, BBN, JPC and BKL have commitments to sell 8 million metric tonnes of coal to various buyers. These coal sales will be delivered during the period from January 2024 to November 2025.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

f. Perjanjian pembelian batubara

BBN

Pada tanggal 31 Desember 2024, BBN memiliki komitmen untuk membeli 10,9 juta metrik ton batubara dari beberapa pemasok. Pembelian batubara ini akan dilakukan selama periode mulai Januari 2024 sampai dengan Desember 2025.

g. Perjanjian sewa kapal

BAG dan PLN EG

BAG dan PLN EG menandatangani perjanjian sewa kapal dengan beberapa pemberi sewa yang berlaku 5 tahun dari tanggal ditanda tangannya setiap perjanjian. Perjanjian sewa kapal ini berlaku selama Januari 2023 sampai dengan Juni 2028.

h. Perjanjian pengangkutan batubara

BAG

BAG berkontrak dengan pihak berelasi dan pihak ketiga untuk menyediakan jasa transportasi laut untuk pengangkutan batubara bagi PLTU berbahan bakar batubara. Kontrak tersebut berlaku efektif mulai Januari 2011 sampai dengan Agustus 2032.

i. Penyediaan Bahan Bakar Minyak

BAG

Pada tanggal 16 Mei 2007, BAG mengadakan perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak ("BBM") melalui PLN dan Pertamina. Perjanjian tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan addendum perjanjian No. VIII tanggal 8 Februari 2022 yang mengatur bahwa sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab Pertamina dialihkan ke Patra Niaga dan kontrak tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, BAG melalui PLN telah menandatangani perjanjian jual beli bahan bakar minyak baru dengan Patra Niaga mulai 1 Januari 2024.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Coal purchase agreements

BBN

As of 31 December 2024, BBN have commitments to purchase 10.9 million metric tonnes of coal from various suppliers. This coal purchase will be carried out during the period from January 2024 to December 2025.

g. Vessel charter agreement

BAG and PLN EG

BAG and PLN EG signed a vessel charter agreement with several lessors which will be valid for 5 years from each agreement signing date. This vessel charter agreement is valid from January 2023 to June 2028.

h. Coal barging agreement

BAG

BAG has contracted with related parties and third parties to provide coal sea transportation service for coal-fired SPP. The contract is effective from January 2011 to August 2032.

i. Fuel supply

BAG

On 16 May 2007, BAG entered into a sales and purchase agreement for fuel oil ("BBM") through PLN and Pertamina. The agreement has been amended several times. The latest amendment was based on addendum agreement No. VIII dated 8 February 2022 which stated that, as of 1 September 2021, all responsibilities of Pertamina are transferred to Patra Niaga, and the contract will expire on 31 December 2023. To meet the fuel oil requirements, BAG through PLN has entered into a new fuel oil purchase agreement with Patra Niaga starting from 1 January 2024.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

i. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (lanjutan)

BAG (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2024, BAG melalui PLN telah memperbaharui perjanjian jual beli bahan bakar minyak No. 0026.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 dengan Patra Niaga untuk periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024. Atas perjanjian ini sedang dilakukan amandemen untuk perpanjangan atas Kontrak Jangka Panjang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak. Sebagai dasar pembelian bahan bakar minyak dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025, BAG melalui PLN telah menandatangani Kesepakatan Awal No. 0054.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 dan 0011.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2025. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi Grup, amandemen kontrak masih dalam proses perpanjangan.

j. Sewa Fasilitas FSRU

PLN EG

Pada tanggal 16 September 2020, PLN EG dan PLN menandatangani perjanjian tentang jasa terminal fasilitas penyimpanan dan regasifikasi klaster Sulawesi dan transportasi LNG. Perjanjian ini awalnya berlaku sampai 31 Oktober 2020. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir disepakati di tanggal 20 Desember 2022 menjadi perjanjian dengan PNP yang berlaku sampai dengan 18 September 2035.

Pada tanggal 11 Februari 2020, PLN EG dan PT Sulawesi Regas menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung untuk proyek gasifikasi klaster Sulawesi yang berlaku selama 15 tahun dari tanggal pengiriman. PLN EG mempunyai hak pemutusan perjanjian apabila PT Sulawesi Regas tidak bisa menyediakan fasilitas permanen dalam dua tahun. Berdasarkan hal ini, di tahun 2020 PLN EG menentukan jangka waktu sewa ini selama 2 tahun. Di tahun 2023, PLN EG memutuskan untuk tetap menggunakan FSRU non-permanen dari PT Sulawesi Regas sampai selesainya masa kontrak.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

i. Fuel supply (continued)

BAG (continued)

On 12 August 2024, BAG through PLN renewed the fuel oil purchase agreement No. 0026.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 with Patra Niaga for the period from 1 July 2024 to 30 September 2024. An amendment is being made to this agreement for the extension of the Long-Term Contract for the Fuel Oil Purchase Agreement. As a basis for purchasing fuel oil from 1 October 2024 to 31 March 2025, BAG through PLN has entered into the Preliminary Agreement No. 0054.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 and 0011.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2025. As at the date of the Group's consolidated financial statement, the contract amendment is still in the extension process.

j. FSRU Facility Rental

PLN EG

On 16 September 2020, PLN EG and PLN signed an agreement regarding Floating Storage and Regasification Terminal Services for Cluster Sulawesi and LNG Transportation. This agreement was originally valid to 31 October 2020. This agreement has been amended several times with the latest amendment agreed on 20 December 2022 which change the second party to PLN NP and is valid to 18 September 2035.

On 11 February 2020, PLN EG and PT Sulawesi Regas entered into a floating storage and regasification facility rental, operation and maintenance agreement for the Sulawesi cluster gasification project which is valid for 15 years from the delivery date. PLN EG has the right to terminate the agreement if PT Sulawesi Regas cannot provide permanent facilities within two years. Based on this, in 2020 PLN EG determines the term of this lease is 2 years. In 2023, PLN EG decided to keep using the non-permanent FSRU from PT Sulawesi Regas until the end of the contract period. In 2023, the Company decided to keep using the non-permanent FSRU from PT Sulawesi Regas until the end of the contract period.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

k. Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020

Pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") mengesahkan Perubahan atas UU Minerba, dimana pada tanggal 10 Juni 2020 ditandatangani oleh Presiden RI sebagai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4/2009.

UU No. 3/2020 tersebut antara lain mengatur:

- (i) Penyelenggaraan penguasaan aktivitas mineral dan batubara dilakukan oleh Pemerintah Pusat dimana sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (ii) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara ("PKP2B") diberikan jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
 - a. PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK masing-masing untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.
 - b. PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.
- (iii) Kegiatan eksplorasi wajib dilanjutkan oleh pemegang IUPK termasuk menyediakan anggaran eksplorasi dan juga Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara untuk kegiatan eksplorasi cadangan baru.
- (iv) Adanya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP").
- (v) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan 100% kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebelum mencabut atau mengembalikan area konsesinya.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari poin-poin utama undang-undang baru sebagaimana disebutkan di atas.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

k. Mining Law No. 3/2020

On 12 May 2020, the People's Representative Council ("DPR") passed the Amendment to Minerba Law, which on 10 June 2020 was signed by the President of the Republic of Indonesia as Law No. 3 of 2020 on Amendments to Law No. 4/2009.

Law No. 3/2020 sets forth, among others:

- (i) The control of mineral and coal activities is carried out by the Central Government, where previously it was carried out by the Central Government and/or the Regional Government.
- (ii) For the extension of a Coal Contract of Work ("CCoW"), a guarantee for extension to an Special Mining Business License ("IUPK") is provided as a continuation of an Operations Contract/Agreement after meeting the following criteria:
 - a. CCoWs that have not obtained any extension are guaranteed to receive two extensions as an IUPK, each for a maximum period of ten years.
 - b. CCoWs that have not obtained any extension are guaranteed to receive two extensions as an IUPK, each for a maximum period of ten years.
- (iii) Exploration activities must be continued by such IUPK holders, including the provision of exploration budget and Mineral and Coal Reserves Sustainability Fund for exploration of new reserves.
- (iv) A commitment from the central government and local governments (Pemda) to not change the allocation of space and areas for Mining Business Permit Areas ("WIUP").
- (v) Holders of Operation Production IUPs or Operation Production IUPKs are required to carry out 100% of the reclamation and post mining activities before relinquishment or return of the concession area.

Management considers that there is no significant impact on the Group from the main points of the new law as mentioned above.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

I. Peraturan Pemerintah No. 96/2021

Pada tanggal 9 September 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 96/2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan untuk mengatur lebih lanjut berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP ini mencabut dan menggantikan PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebelumnya telah beberapa kali diubah, terakhir dengan diterbitkannya PP No. 8/2018.

Manajemen menilai bahwa tidak ada dampak terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

m. Peraturan Domestic Market Obligation ("DMO")

Pada bulan November 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") mengeluarkan Keputusan No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 yang mengubah Keputusan No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen 399/2023") dimana pemegang IUP Operasi Produksi PKP2B wajib memenuhi persentase penjualan batubara untuk DMO 25% dari jumlah produksi aktual batubara pada tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan swasta dan bagi bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam hal pemegang IUP dan PKP2B dimaksud tidak memenuhi persentase DMO yang disyaratkan, maka akan dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi sesuai dengan ketentuan Kepmen 399/2023.

Manajemen menilai bahwa tidak ada dampak terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

n. Peraturan iuran eksploitasi

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan PP No. 15/2022 yang mengatur perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dalam sektor pertambangan batubara. Pengaturan ini berlaku untuk pemegang IUP, IUPK, IUPK eks PKP2B dan PKP2B:

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

I. Government Regulation No. 96/2021

On 9 September 2021, the Government issued Government Regulation ("GR") No. 96/2021 concerning the Implementation of Mining Business Activities to further regulate various provisions stipulated in Law No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining, which has been amended by Law No. 3/2020 concerning Amendments to Law No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining. This GR revokes and replaces GR No. 2/2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which had previously been amended several times, most recently with the issuance of GR No. 8/2018.

Management considers that there is no impact on the Group from the new regulation.

**m. Domestic Market Obligation ("DMO")
regulation**

In November 2023, the Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia ("MoEMR") issued Decree No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 which amend the Decree No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 regarding the Fulfillment of Coal DMO ("Decree 399/2023") under which the IUP Production Operation and CCoW holders are required to fulfill the percentage of coal sales for DMO 25% from the actual of coal production within the current year to fulfill the coal requirement for the supply of electricity for public and private interests and for raw materials/fuel for industry. In the event that the IUP and CCoW holders do not fulfill the required DMO percentage, then it will be subject to an obligation to pay compensation fund in accordance with the provisions of Decree 399/2023.

Management considers that there is no impact on the Group from the new regulation.

n. Exploitation fee regulation

On 11 April 2022, the Government of Indonesia issued GR No. 15/2022 which regulates the treatment of tax and/or non-tax state revenue ("PNBP") in the coal mining sector. This regulation applies to holders of an IUP, IUPK, IUPK ex CCoW and CCoW:

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

n. Peraturan iuran eksploitasi (lanjutan)

Ketentuan PNBPN bagi Pemegang IUPK eks PKP2B diantaranya mengatur sebagai berikut:

- (i) Kewajiban PNBPN Produksi dengan tarif berjenjang untuk penjualan ekspor dan domestik, tergantung dari jenis PKP2B:
 - a. IUPK dari PKP2B Generasi 1 dengan tarif berjenjang sebesar 14%-28% sesuai lapisan Harga Batubara Acuan ("HBA").
 - b. IUPK dari PKP2B Generasi 1+ dengan tarif berjenjang 20%-27% sesuai lapisan HBA.
- (ii) Kewajiban PNBPN Produksi di atas termasuk:
 - a. Tarif iuran Tetap dan iuran Produksi/Royalti sesuai ketentuan berlaku.
 - b. Tarif 0,21% dikalikan Harga Jual atas Pemanfaatan Barang Milik Negara eks PKP2B.
- (iii) Tarif penerimaan negara bukan pajak dan retribusi daerah sebesar 4% dan 6% dari pendapatan bersih setelah pajak untuk IUPK.

Ketentuan perpajakan akan berlaku mulai tahun 2023 dan Grup masih menunggu peraturan pelaksanaannya.

Pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemerintah mengeluarkan PP No. 26/2022 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian ESDM, termasuk penyesuaian pada tarif iuran eksploitasi/royalti batubara. Besaran tarif iuran eksploitasi/royalti batubara berjenjang 5%-13,5% sesuai tingkat kalori dan lapisan HBA. Peraturan ini berlaku sejak 14 September 2022. PP ini mencabut PP No. 81/2019.

Manajemen berkeyakinan bahwa Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan sebagaimana disebut di atas.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

n. Exploitation fee regulation (continued)

Provisions on PNBPN for IUPK ex CCoW holders, among others, regulate the following:

- (i) Production PNBPN obligations with tiered tariffs for export and domestic sales, depending on the type of CCoW:
 - a. IUPK from CCoW Generation 1 with tiered tariffs of 14%-28% according to the Benchmark Coal Price ("HBA") layer.
 - b. IUPK from CCoW Generation 1+ with a tiered tariff of 20%-27% according to the HBA layer.
- (ii) The above Production PNBPN obligations include:
 - a. Dead Rent and Production Contribution/Royalty Tariff in accordance with applicable regulations.
 - b. The tariff is 0.21% multiplied by selling price for the Utilisation of State Property ex CCoW.
- (iii) Non-tax state revenue and regional retribution tariff of 4% and 6% from the net income after tax for IUPK.

The tax provisions will be effective from 2023 and the Group is still waiting for implementing regulations.

On 15 August 2022, the Government issued GR No. 26/2022 concerning types and tariffs of PNBPN applicable to the MoEMR, including adjustments on coal exploitation fee/royalty tariffs. The amount of coal exploitation fee/royalty tariffs is ranging of 5%-13.5% according to the calorific value and HBA layer. This regulation is effective from 14 September 2022. This regulation revokes GR No. 81/2019.

Management believes that the Group has complied with the requirements of the regulations mentioned above.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

**o. Peraturan reklamasi dan aktivitas pasca
tambang**

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang diikuti oleh Peraturan Menteri ESDM No. 7/2014 tertanggal 28 Februari 2014 ("Permen No. 7/2014"), yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Permen No. 7/2014 ini telah dicabut oleh Peraturan MESDM No. 26/2018 pada tanggal 3 Mei 2018.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan liabilitas pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Grup menghitung besarnya liabilitas tersebut yang mencukupi untuk memenuhi liabilitas yang timbul ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, JPC dan BKL telah membuat jaminan reklamasi untuk periode tertentu.

p. Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU No. 7/2021 memuat sejumlah perubahan aturan perpajakan antara lain membatalkan penurunan tarif PPh Badan sebelumnya dari 22% ke 20% di tahun pajak 2022, sehingga tarif PPh Badan tetap di 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, kenaikan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi sebesar 35% dengan penghasilan kena pajak diatas Rp5 miliar berlaku mulai tahun pajak 2022, kenaikan bertahap tarif PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 dan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**o. Regulation on reclamation and post-mining
activities**

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") which was followed on 28 February 2014, by Ministerial Regulation of ESDM No. 7/2014 ("MR No. 7/2014"), that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This MR No. 7/2014 has been revoked by the Ministerial Regulation of ESDM No. 26/2018 on 3 May 2018.

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantee does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

The Group has certain obligations to restore and rehabilitate mining areas following the completion of production. Such obligations are accrued, so that the accrual will be adequate to meet those obligations once the production process is fully completed. Changes in estimated restoration and environmental costs to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

As at the date of these consolidated financial statements, JPC and BKL have placed reclamation guarantees for certain periods.

p. Law No. 7/2021

On 29 October 2021, the Government agreed on Law No. 7/2021 relating to Harmonisation of Tax Regulations. Law No. 7/2021 contains a number of changes to tax rules, including repealing the previous reduction in CIT rate from 22% to 20% in fiscal year 2022, so that the CIT rate remains at 22% for fiscal year 2022 onwards, an increase in the highest Personal Income Tax rate to 35% for taxable income above IDR5 billion from the 2022 fiscal year, a gradual increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and 12% no later than 1 January 2025 and a taxpayer voluntary disclosure programme.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

p. Undang-Undang No. 7/2021 (lanjutan)

Pada 1 Januari 2025, Pemerintah mengesahkan PMK 113/2024 yang mengatur tentang mekanisme dasar penerapan PPN 12%.

Undang-Undang ini juga memperkenalkan Pajak Karbon. Subjek Pajak Karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Karbon akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Pemerintah.

Pada bulan Desember 2022, Pemerintah menerbitkan 4 PP yang menjadi peraturan turunan dari UU No. 7/2021 yaitu:

1. PP No. 44/2022 tentang Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM").
2. PP No. 49/2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.
3. PP No. 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. PP No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

q. UU Cipta Kerja

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Selama 2021, Pemerintah secara resmi mengesahkan beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, pada bulan November 2021, Mahkamah Konstitusi ("MK") menggelar sidang putusan hasil uji formil dan materiil UU Cipta Kerja dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan tersebut diputuskan. Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

p. Law No. 7/2021 (continued)

On 1 January 2025, the Government ratified PMK 113/2024 which regulates the basic mechanism for implementing 12% VAT tariff.

The Law also introduces a Carbon Tax. The subject of the Carbon Tax is an individual or entity that buys goods containing carbon and/or carries out activities that produce carbon emissions. Further provisions regarding the Carbon Tax will be regulated in a Minister of Finance Regulation and/or Government Regulation.

In December 2022, the Government issued 4 GRs derived from Law No. 7/2021 which are:

1. GR No. 44/2022 regarding Implementation of VAT on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods ("PPnBM").
2. GR No. 49/2022 regarding VAT Exemption and Non-collectible VAT or PPnBM on Imported and/or Transfer of Certain Goods and/or Transfer of Certain Services and/or Utilisation of Certain Services from Outside Customs Area.
3. GR No. 50/2022 regarding Procedures for the Implementation of Rights and Fulfilment of Tax Obligations.
4. GR No. 55/2022 regarding the Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.

q. Job Creation Law

In November 2020, Law No. 11/2020 about Job Creation became effective. During 2021, the Government officially authorised various implementing regulations.

Subsequently, in November 2021, the Constitutional Court ("MK") held a hearing on the results of the formal and material test of the Job Creation Law number 91/PUU-XVIII/2020. In its ruling, the MK stated that the Job Creation Law was conditionally unconstitutional and had to be amended within two years of the decision being made. The MK decision has stated that the current law remains constitutionally valid until its formation is corrected in accordance with the grace period set by the MK, which must be amended no later than two years from the decision.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

q. UU Cipta Kerja (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan PP Pengganti Undang-Undang ("Perppu") No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Ketetapan ini untuk melaksanakan amanat revisi Undang-Undang Cipta Kerja serta untuk mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik yang ditimbulkan oleh dinamika global saat ini. Penyesuaian dalam Perppu No. 2/2022 sebagian besar terkait dengan penggunaan istilah dan pengaturan ulang kalimat serta beberapa perubahan yang cukup substansial, seperti penghapusan pasal terkait kewajiban pengelolaan limbah B3 dari ketentuan pengenaan sanksi administratif, adanya perubahan definisi "persetujuan bangunan" serta terkait dengan ketenagakerjaan adanya perubahan substansial terkait ketentuan outsourcing dan upah minimum.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perppu No. 2/2022 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. MK meminta pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru dan terpisah dari UU Cipta Kerja.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

**r. Keputusan Menteri ESDM No.
18.K/HK.02/MEM.B/2022**

Pada tanggal 27 Januari 2022, MESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di antaranya mengatur:

- (i) Mencabut sebagian ketentuan dalam Keputusan Menteri No. 1823.K/30/MEM/2018.
- (ii) Menetapkan kembali harga dasar untuk perhitungan royalti.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

q. Job Creation Law (continued)

On 30 December 2022, the Government issued a Government Regulation in lieu of Law ("Perppu") No. 2/2022 regarding Job Creation. This decree is to carry out the mandate of the revision of the Job Creation Law and to anticipate various economic and geopolitical challenges posed by the current global dynamics. Adjustments in the Perppu No. 2/2022 are mostly related to the use of terms and rearrangement of sentences, as well as some quite substantial changes, such as the removal of articles related to the obligation to manage B3 waste from provisions for imposing administrative sanctions, changes to the definition of "building approval", and related to employment, there are substantial changes regarding outsourcing and minimum wage provisions.

On 31 March 2023, Perppu No. 2/2022 was stipulated as a Law based on Law No. 6/2023 concerning the Stipulation of Perppu No. 2/2022 concerning Job Creation to Become Law.

On 31 October 2024, the MK partially granted the request for a judicial review of the Job Creation Law. The MK requested the formation of a new labor law, separate from the Job Creation Law.

Management assesses that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

**r. Ministerial Decree of MoEMR
No.18.K/HK.02/MEM.B/2022**

On 27 January 2022, MoEMR issued Ministerial Decree No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 regarding the guidelines for the payment of Dead Rent, Production Fee/Royalty, and Coal Production Result Fund and Adjustment Fee Amount/Formula in Mineral and Coal Mining Business Activities, which regulated the following:

- (i) Revoking some provisions under Ministerial Decree No. 1823.K/30/MEM/2018.
- (ii) Re-stipulating the base price for royalty calculation.

Management assesses that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

s. Peraturan Presiden No. 55/2022

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55/2022 yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi mengenai penerbitan IUP, Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP"). Pendelegasian Perizinan tersebut juga disertai dengan pendelegasian wewenang untuk pemberian dan penetapan WIUP dan penetapan harga patokan.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

t. Peraturan Pemerintah No. 15/2022

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15/2022 yang mengatur perlakuan pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak dalam sektor pertambangan batubara untuk pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai kelanjutan dari PKP2B/PKP2B, PKP2B dengan ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam kontrak dan PKP2B yang mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penghasilan dari usaha sebagai objek pajak untuk penghitungan PPh Badan adalah nilai dari penjualan produk pertambangan batubara yang akan ditentukan pada saat penjualan terjadi berdasarkan yang lebih tinggi antara:

- Yang lebih rendah antara harga patokan batubara sebagaimana ditetapkan oleh MESDM atau indeks harga batubara pada saat transaksi; atau
- Harga jual aktual yang seharusnya diterima oleh penjual

Namun, jika harga patokan batubara atau indeks harga batubara tidak tersedia, nilainya dihitung dengan harga jual aktual yang seharusnya diterima oleh penjual.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

s. Presidential Regulation No. 55/2022

On 11 April 2022, the Government of Indonesia issued Presidential Regulation No. 55/2022 which regulates the delegation of authority in mining management from the Central Government to the Provincial Government regarding the issuance of IUP, Mining Services Business Permit ("IUJP"). The delegation of Licensing is also accompanied by the delegation of authority to grant and determine the WIUP and determination of benchmark prices.

Management assesses that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

t. Government Regulation No. 15/2022

On 11 April 2022, Government issued the Government Regulation No. 15/2022 that regulates the treatment of tax and/or non-tax state revenue in the coal mining sector for IUP/IUPK/IUPK as continuation of CCoW/CCoW holders, CCoW with income tax provisions stipulated in the contract and CCoW that follows the prevailing tax regulations.

Based on this Government Regulation, income from business as taxable object for CIT calculation is the value of coal mining product sales that are to be determined at the time when the sale occurs based on the higher of:

- The lower of coal benchmark price as stipulated by the MoEMR or coal price index at the time of the transaction; or
- The actual selling price that is supposed to be received by the seller.

However, if the coal benchmark price or coal price index is not available, the values are calculated by the actual selling price that is supposed to be received by the seller.

Management assesses that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/82 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN
KONTINGENSI (lanjutan)**

u. Peraturan Pemerintah No. 36/2024

Pada tanggal 30 September 2024, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36/2024 yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan tarif dan jenis PNBP yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan, yaitu PP No. 12/2014, PP No. 33/2014, dan PP No. 44/2014.

Berdasarkan peraturan ini, diatur beberapa jenis PNBP yang berlaku, termasuk denda administrative atas pelanggaran, perizinan dan penyusunan dokumen lingkungan.

Manajemen menilai bahwa saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap Grup dari peraturan baru tersebut.

**27. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

u. Government Regulation No. 36/2024

On 30 September 2024, the Government issued Government Regulation No. 36/2024 which regulates the Types and Rates of Non-Tax State Revenue ("PNBP") applicable in the Ministry of Environment and Forestry, where this regulation was made to adjust the rates and types of PNBP previously regulated in several regulations, namely GR No. 12/2014, GR No. 33/2014, and GR No. 44/2014.

Based on this regulation, several types of PNBP are regulated, including administrative fines for violations, licensing and preparation of environmental documents.

Management assesses that there is no significant impact on the Group from the new regulation.

28. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang sewa pembiayaan dan piutang non-usaha sebesar Rp15.409.678 (31 Desember 2023: Rp11.132.873). Grup hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, pinjaman pemegang saham dan liabilitas sewa sebesar Rp16.105.873 (31 Desember 2023 : Rp11.139.891). Grup hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

28. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

As at 31 December 2024, the Group's financial assets comprised cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, trade receivables, finance lease receivables and non-trade receivables amounted to Rp15,409,678 (31 December 2023 : Rp11,132,873). The Group only has financial assets categorised as financial assets held at amortised cost.

As at 31 December 2024, the Group's financial liabilities comprised trade payables, other payables, accrued expenses, shareholder loan and lease liabilities amounted to Rp16,105,873 (31 December 2023: Rp11,139,891). The Group only has financial liabilities categorised as financial liabilities held at amortised cost.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

I. Faktor risiko keuangan

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

I. Financial risk factors

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/83 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko pasar

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Perusahaan tidak melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola eksposur atas nilai tukar mata uang asing tersebut, kebijakan Perusahaan untuk memastikan bahwa total eksposur tetap pada batas yang dapat diterima adalah dengan menjual atau membeli valuta asing dengan kurs spot saat diperlukan untuk mengatasi ketidak seimbangan jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika Rupiah menguat/(melemah) sebesar 1% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain konstan, jumlah laba tahun berjalan lebih tinggi/rendah sebesar Rp39.025 (2023: Rp21.529), terutama diakibatkan oleh keuntungan/(kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba sebelum pajak tahun berjalan.

ii. Risiko suku bunga

Eksposur terhadap suku bunga dimonitor untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Grup. Pinjaman pemegang saham dan *notional pooling* Grup menggunakan suku bunga tetap, sehingga tidak terdapat risiko pengaruh suku bunga mengambang dari pinjaman pemegang saham.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and the liquidity risk.

a. Market risk

i. Foreign exchange risk

The Company undertakes many transactions denominated in foreign currency. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Company's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

The Company does not hedge its foreign currency exposure. To manage their foreign currency exposure, the Company's policy is to ensure that their net exposure is kept to an acceptable level by buying or selling foreign currencies at spot rates when necessary to address short-term imbalances.

As at 31 December 2024, if Rupiah had appreciated/(depreciated) by 1% against foreign currency with all other variables held constant, total profit for the year would have been Rp39,025 higher/lower (2023: Rp21,529) mainly as a result of foreign exchange gains/(losses) on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables and trade payables. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

ii. Interest rate risk

Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Group. Interest rate of the Group's shareholder loan and notional pooling are using fixed rates, therefore there is no floating interest rate risk from the shareholder loan.

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

ii. Risiko suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang adalah kas dan setara kas di bank dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya di bank. Risiko pengaruh suku bunga mengambang pada kas dan setara kas dan kas di bank dan setara kas yang dibatasi penggunaannya di bank tidak signifikan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Untuk piutang usaha, Grup menilai bahwa risiko kredit adalah minimal karena piutang usaha mayoritas berasal dari PLN dan entitas anaknya. Untuk kas dan setara kas dan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, Grup meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada beberapa bank untuk menghindari pemusatan yang signifikan dengan satu institusi.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

a. Market risk (continued)

ii. Interest rate risk (continued)

As at 31 December 2024, the financial assets and financial liabilities of the Group which are impacted by floating interest rates are cash and cash equivalents in banks and restricted cash and cash equivalents in banks. Floating interest rate risk on cash and cash equivalents in banks and restricted cash and cash equivalents in banks is not significant.

b. Credit risk

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables and restricted cash and cash equivalents.

For trade receivables, the Group assesses the credit risk is minimal as trade receivables are mostly derived from PLN and its subsidiaries. For cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents, the Group minimise credit risk by placing the funds in several banks to avoid significant concentration with one institution.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kas dan setara kas di bank			Cash and cash equivalents in banks
Pefindo			Pefindo
AAA	1,859,544	1,099,439	AAA
A+	<u>887</u>	<u>662</u>	A+
	<u><u>1,860,431</u></u>	<u><u>1,100,101</u></u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

I. Financial risk factors (continued)

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit risk (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash and cash equivalents
Pefindo			Pefindo
AAA	19,480	8,993	AAA
A+	<u>9,865</u>	<u>9,865</u>	A+
	<u>29,345</u>	<u>18,858</u>	
Piutang usaha			Trade receivables
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo			Pefindo
AAA	<u>1,784,945</u>	<u>599,367</u>	AAA
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal			Counterparties without external credit rating
Grup 1	7,378,994	5,234,897	Group 1
Grup 2	<u>844,086</u>	<u>351,633</u>	Group 2
	<u>8,223,080</u>	<u>5,586,530</u>	
	<u>10,008,025</u>	<u>6,185,897</u>	
Piutang non-usaha			Non-trade receivables
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal			Counterparties with external credit rating
Pefindo			Pefindo
AAA	<u>25,636</u>	<u>84,298</u>	AAA
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal			Counterparties without external credit rating
Grup 1	162,066	122,591	Group 1
Grup 2	<u>481,908</u>	<u>443,960</u>	Group 2
	<u>669,610</u>	<u>650,849</u>	

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/86 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

- Grup 1 - pelanggan baru/pihak-pihak berelasi (kurang dari enam bulan).
- Grup 2 - pelanggan yang sudah ada/pihak-pihak berelasi (lebih dari enam bulan) tanpa adanya kasus gagal bayar di masa terdahulu.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

b. Credit risk (continued)

- Group 1 - new customers/related parties (less than six months).
- Group 2 - existing customers/related parties (more than six months) with no defaults in the past.

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below describes the Group's financial liabilities based on their maturities. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ Contractual maturities of financial liabilities				Jumlah/ Total
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	
31 Desember 2024					
Utang usaha	5,490,285	-	-	-	5,490,285
Utang lain-lain	3,893,451	144,325	-	-	4,037,776
Biaya yang masih harus dibayar	407,960	-	-	-	407,960
Pinjaman pemegang saham	352,892	795,952	572,311	170,500	1,891,655
Liabilitas sewa	1,198,587	1,868,833	1,101,400	2,814,955	6,983,775
	<u>11,343,175</u>	<u>2,809,110</u>	<u>1,673,711</u>	<u>2,985,455</u>	<u>18,811,451</u>
31 Desember 2023					
Utang usaha	2,281,046	-	-	-	2,281,046
Utang lain-lain	2,390,146	144,225	-	-	2,534,371
Biaya yang masih harus dibayar	619,808	-	-	-	619,808
Pinjaman pemegang saham	343,278	925,986	628,897	187,439	2,085,600
Liabilitas sewa	962,277	2,012,305	774,760	1,808,390	5,557,732
	<u>6,596,555</u>	<u>3,082,516</u>	<u>1,403,657</u>	<u>1,995,829</u>	<u>13,078,557</u>

31 Desember 2024

Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Shareholder loan
Lease liabilities

31 Desember 2023

Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Shareholder loan
Lease liabilities

**PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/87 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2024

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

II. Manajemen risiko permodalan

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman ekuitas pemegang saham. Direksi secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

III. Estimasi nilai wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

II. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of shareholders' equity. The Board of Directors regularly reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

III. Fair value estimation

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2024 and 2023.

30. TAMBAHAN INFORMASI TERKAIT ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

30. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO CASH FLOWS

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	31 Desember/ December 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Repayment	Amortisasi nilai wajar/ Amortisation fair value	31 Desember/ December 2024	
Pinjaman pemegang saham	1,592,667	101,477	(255,916)	47,502	1,485,730	Shareholder loan
Liabilitas sewa	4,112,002	1,267,891	(695,771)	-	4,684,122	Lease liabilities
Notional pooling	2,182,092	5,238,565	(3,650,859)	-	3,769,798	Notional pooling
	7,886,761	6,607,933	(4,602,546)	47,502	9,939,650	
	31 Desember/ December 2022	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Repayment	Amortisasi nilai wajar/ Amortisation fair value	31 Desember/ December 2023	
Pinjaman pemegang saham	1,654,642	297,606	(404,825)	45,244	1,592,667	Shareholder loan
Liabilitas sewa	3,215,246	1,241,402	(344,646)	-	4,112,002	Lease liabilities
Notional pooling	399,420	2,212,206	(429,534)	-	2,182,092	Notional pooling
	5,269,308	3,751,214	(1,179,005)	45,244	7,886,761	

**31. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 30 Mei 2025.

**31. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

These consolidated financial statements were prepared and authorised for issuance by the Board of Directors on 30 May 2025.